



**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KECENDERUNGAN KECURANGAN (*FRAUD*)  
PADA APARATUR PEMERINTAH DESA  
DI KEC. PUJER BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Chusnul Khotimah**  
**NIM 140810301008**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KECENDERUNGAN KECURANGAN (*FRAUD*)  
PADA APARATUR PEMERINTAH DESA  
DI KEC. PUJER BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana

Oleh  
**Chusnul Khotimah**  
**NIM 140810301008**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan Ridho, Rahmat dan KehendakMu sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Ibu Saerah dan Bapak Purwoko terimakasih atas doa, dukungan, perhatian dan kasih sayangmu selama ini serta memberikan saya nasehat yang tiada hentinya.
3. Kakakku Setiawan Wicaksono dan Adikku Aulia Nur Cahya Ningrum tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi
4. Dosen Pembimbing saya Taufik Kurrahman, SE.,M.SA.,Ak dan Drs. Sudarno, M.Si, Ak, CA.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTO**

Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira,

Man Sara Ala Darbi Washala

( Siapa bersungguh – sungguh pasti berhasil, Siapa yang bersabar pasti beruntung,

Siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Mustholah Hadits. Takharij Hadits Man Jadda Wajada.  
<https://ikhwahmedia.wordpress.com/2013/01/05/takharij-hadits-man-jadda-wajada/>. 16 Januari 2016

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chusnul Khotimah

NIM : 140810301008

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Aparatur Pemerintah Desa di Kec. Pujer Bondowoso” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Januari 2018

Yang menyatakan,

Chusnul Khotimah

NIM 140810301008

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Faktor – Faktor yang Mempengaruhi  
Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada  
Aparatur Pemerintah Desa di Kec. Pujer  
Bondowoso

Nama Mahasiswa : Chusnul Khotimah  
NIM : 140810301008  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Tanggal Persetujuan : 29 Desember 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Taufik Kurrohman, SE., M.SA, Ak, CA.  
NIP. 19820723 200501 1002

Drs. Sudarno, M.Si, Ak, CA.  
NIP. 19601225 198902 1001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak, CA.  
NIP. 19780927 200112 1002

**SKRIPSI**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KECENDERUNGAN KECURANGAN (*FRAUD*)  
PADA APARATUR PEMERINTAH DESA  
DI KEC. PUJER BONDOWOSO**

Oleh

**Chusnul Khotimah**

**NIM 140810301008**

Pembimbing :

Dosen Pembimbing I : Taufik Kurrohman, S.E., M.Si, Ak.

Dosen Pembimbing II : Drs. Sudarno, M.Si, Ak, CA.

**PENGESAHAN  
JUDUL SKRIPSI**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KECENDERUNGAN KECURANGAN (*FRAUD*)  
PADA APARATUR PEMERINTAH DESA  
DI KEC. PUJER BONDOWOSO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Chusnul Khotimah

NIM : 140810301008

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

22 Januari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Indah Purnamawati, SE.,M.Si,Ak (.....)  
NIP. 19691011 199702 2 001

Sekretaris : Kartika, SE.,MSc,Ak (.....)  
NIP. 19820207 200812 2 002

Anggota : Moch. Shultoni, SE.,MSA,Ak (.....)  
NIP. 19800707 201504 1 002

Mengetahui / Menyetujui

Universitas Jember  
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak,CA.  
NIP 19710727 199512 1 001



**Chusnul Khotimah**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para aparatur pemerintah desa mengenai pengaruh moralitas, pengendalian internal, motivasi karyawan dan penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa di kecamatan Pujer dan sampel penelitian ini sejumlah 75 pegawai perangkat desa dari lima desa yang terletak di kecamatan Pujer yaitu desa Mengok, Sukowono, Sukokerto, Maskuning Wetan dan Kejayan. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti merupakan data primer dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan metode regresi linear berganda yaitu uji F, Uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif moralitas aparatur terhadap kecenderungan kecurangan di pemerintah desa, terdapat pengaruh negatif pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa, tidak terdapat pengaruh positif motivasi karyawan terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa dan tidak terdapat pengaruh negatif penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa.

**Kata Kunci:** Kecurangan (*Fraud*), Persepsi, Aparatur Desa, Moralitas, Pengendalian Internal, Motivasi, Penegakan Hukum

**Chusnul Khotimah**

*Accounting Department, Faculty Of Economic and Business, Jember University*

***ABSTRACT***

This research aims to know about the perception of village government apparatus on the influence of morality, internal control, employee motivation and law enforcement on fraud trends in the village government sector. The population of this research are the village apparatus is Pujer Subdistrict and the sample of this research are 75 village officials from five villages that is located in Pujer Subdistrict i.e Mengok, Sukowono, Sukokerto, Maskuning and Kejayan village. The sampling technique is purposive sampling. Data collection techniques that is used by the researcher is the primary data by using questionnaire. Methods of data analysis in this research use descriptive statistics, data quality test, classical assumption test, hypothesis test with multiple linear regression methods that are F test, T test and test of determination coefficient. The results of the research show that, there is positive influence of apparatus morality to fraud tendency in village government, there is negative influence of internal control to fraud tendency in village government sector, there is no positive influence of employee motivation to fraud tendency in village government sector, there is no negative influence of law enforcement to fraud tendency in village government sector.

Keywords : fraud, perception, village apparatus, morality, internal control, motivation , law enforcement

## RINGKASAN

**“ FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN (*FRAUD*) PADA APARATUR PEMERINTAH DESA DI KEC. PUJER BONDOWOSO”**. Chusnul Khotimah, 140810301008; 2018; 60 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah. Saat ini, desa memiliki peranan penting dalam hal pembangunan desa. Berdasarkan UU Desa yang telah disahkan oleh pemerintah pada tahun 2014. Desa memperoleh kucuran dana dari dana APBN. Besarnya dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dikelola oleh desa tanpa diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat menjadikan penyalahgunaan wewenang atas dana yang diberikan. Fraud merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang persepsi aparatur desa di kecamatan Pujer terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Faktor – faktor tersebut meliputi moralitas, pengendalian internal, motivasi dan penegakan hukum.

Populasi penelitian ini sebanyak 162 dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 sampel aparatur desa di lima desa di kecamatan Pujer. 75 aparatur desa ini terdiri atas Kepala desa, sekretaris desa, Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Teknik penarikan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat analisis SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif moralitas aparatur terhadap kecenderungan kecurangan di pemerintah desa, terdapat pengaruh negatif pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa, tidak terdapat pengaruh positif motivasi karyawan terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa dan tidak terdapat pengaruh negatif penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada Aparatur Pemerintah Desa di Kec. Pujer Bondowoso”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, S.E,M.Com,Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyono, S.E, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi;
4. Septarina Prita Dania S., S.E, M.SA, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Taufik Kurrohman S.E, M.SA, Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan dan motivasi hingga skripsi ini selesai;
6. Drs. Sudarno, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan ibu dosen Akuntansi yang telah memberikan ilmu mengenai akuntansi;
8. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi;
9. Teman yang selalu ada, yang selalu memberikan dukungan, doa dan perhatian M. Arifin S;

10. Teman – teman seperjuangan yang senantiasa membantuku : Puji Rahayu dan Siti Nurainul Jannah;
11. Teman – teman seperjuangan Akuntansi 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan warna dalam proses perkuliahan dan membantu dalam terselesainya skripsi ini;
12. Bapak dan Ibu responde serta semua pihak di BPKAD dan Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso yang telah bersedia meluangkan waktu guna pengambilan sampel dan pengumpulan data pada proses penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti ketidaksempurnaan pada diri manusia. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 10 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vii
HALAMAN PEMBIMBING .....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
RINGKASAN .....	x
PRAKATA .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Grand Teori .....	7
2.1.1 <i>Fraud Gone</i> .....	7
2.1.2 <i>Teori Agency</i> .....	9
2.2 Pengertian Persepsi.....	10
2.3 Fraud .....	11
2.3.1 Pengertian Fraud .....	11
2.3.2 Jenis – Jenis Fraud.....	12
2.4 Moralitas Aparatur .....	13
2.5 Pengendalian Internal.....	14

2.6 Motivasi.....	16
2.7 Penegakan Hukum.....	17
2.8 Faktor Penyebab Terjadinya Fraud.....	18
2.9 Fraud di Sektor Pemerintah Desa .....	19
2.10 Penelitian Terdahulu .....	20
2.11 Kerangka Berfikir .....	27
2.12 Perumusan Hipotesis .....	29
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Populasi dan Sampel.....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	36
3.5.1 Variabel Dependen.....	37
3.5.2 Variabel Independen .....	38
3.5.3 Pengukuran kategori variabel Moralitas Aparatur .....	41
3.5.4 Pengukuran kategori variabel Pengendalian Internal.....	42
3.5.5 Pengukuran kategori variabel Motivasi .....	43
3.5.6 Pengukuran kategori variabel Penegakan Hukum .....	44
3.5.7 Pengukuran kategori variabel Kecurangan ( <i>Fraud</i> ).....	44
3.6 Metode Analisis Data .....	45
3.6.1 Metode Statistik Deskriptif .....	46
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	46
3.6.2.1 Uji Validitas .....	47
3.6.2.2 Uji Reliabilitas .....	47
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	47
3.6.3.1 Uji Normalitas Data .....	47
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas .....	48
3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas .....	48
3.6.4 Uji Hipotesis .....	49
3.6.4.1 Uji F (Uji Model) .....	49

3.6.4.2 Uji t .....	49
3.6.4.3 Koefisien Determinasi.....	50
<b>3.7 Kerangka Pemecahan Masalah .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian.....</b>	<b>52</b>
4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	52
4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	54
4.1.2.1 Deskripsi Variabel moralitas.....	55
4.1.2.2 Deskripsi Variabel Pengendalian Internal.....	55
4.1.2.3 Deskripsi Variabel Motivasi .....	56
4.1.2.4 Deskripsi Variabel Penegakan Hukum .....	57
4.1.2.5 Deskripsi Variabel Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) di sektor pemerintah desa .....	57
<b>4.2 Analisis Uji Kualitas Data .....</b>	<b>58</b>
4.2.1 Hasil Uji Validitas.....	58
4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	59
<b>4.3 Analisis Uji Asumsi Klasik.....</b>	<b>60</b>
4.3.1 Hasil Uji Normalitas Data.....	60
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
4.3.3 Hasil Uji Heterodaktisitas .....	61
<b>4.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....</b>	<b>62</b>
4.4.1 Uji f (Model) .....	63
4.4.2 Uji t .....	64
4.4.3 Koefisien Determinasi.....	65
<b>4.5 Pembahasan .....</b>	<b>65</b>
4.5.1 Pengaruh Moralitas Aparatur Terhadap Kecenderungan Kecurangan.	65
4.5.2 Pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan	66
4.5.3 Pengaruh motivasi terhadap kecenderungan kecurangan .....	67
4.5.4 Pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan .....	67
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>69</b>



<b>5.2 Keterbatasan Peneliti.....</b>	<b>70</b>
<b>5.3 Saran .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	34
Tabel 3.2 Pengukuran Skala <i>Likert</i> .....	36
Tabel 3.3 Pengukuran Skala <i>Likert</i> Variabel Moralitas .....	36
Tabel 3.4 Kategori Variabel Moralitas Aparatur .....	42
Tabel 3.5 Kategori Variabel Pengendalian Internal.....	43
Tabel 3.6 Kategori Variabel Motivasi.....	43
Tabel 3.7 Kategori Variabel Penegakan Hukum.....	44
Tabel 3.8 Kategori Variabel <i>Fraud</i> .....	45
Tabel 4.1 Rekapitulasi Jumlah Populasi .....	53
Tabel 4.2 Hasil Pengumpulan Data.....	54
Tabel 4.3 Analisa Statistik Deskriptif masing – masing variabel .....	54
Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Data .....	58
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas .....	59
Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	60
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	62
Tabel 4.9 Hasil Uji Model.....	63
Tabel 4.10 Hasil Uji <i>t</i> .....	64
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	65

**TABEL GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	27
Gambar 2 2 kerangka pemecahan masalah .....	51



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 KUESIONER PENELITIAN

Lampiran 2 SKOR NILAI

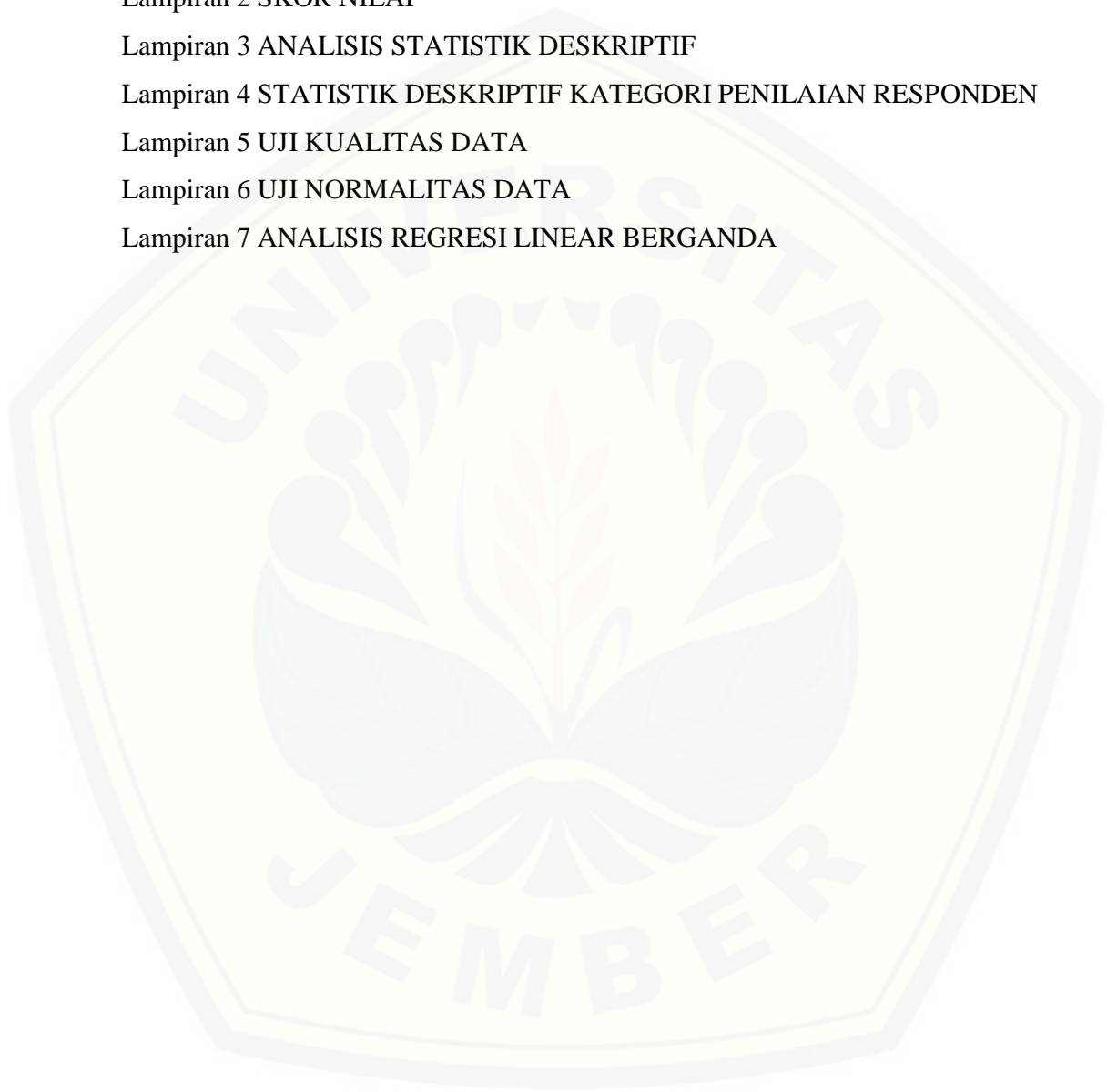
Lampiran 3 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Lampiran 4 STATISTIK DESKRIPTIF KATEGORI PENILAIAN RESPONDEN

Lampiran 5 UJI KUALITAS DATA

Lampiran 6 UJI NORMALITAS DATA

Lampiran 7 ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA



## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut UU Desa bab I pasal I menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah. Jika diibaratkan saat ini, desa bagaikan kaki dari bangsa Indonesia. Jika kaki lumpuh maka badan dan kepala tidak akan dapat bekerja secara maksimal karena tidak ditopang kaki yang kuat. Pentingnya peranan sebuah desa maka pemerintah saat ini, menjadikan pembangunan desa sebagai prioritas utama. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang – Undang Desa pada tahun 2014, pemerintah ingin menjadikan desa sebagai program pemberdayaan desa untuk mengentaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara ini seperti mengurangi tingkat kemiskinan, kumuh, fasilitas desa yang kurang memadai, pemahaman teknologi informasi yang kurang serta kesenjangan sosial dan menjadikan desa sebagai modal dalam pembangunan kedepan.

Melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp. 20,776 triliun dalam APBN-P 2015. Dana tersebut akan dibagikan pada kurang lebih 74.000 desa yang tersebar di seantero nusantara seperti data yang dimuat dalam PEDEKIK.com. Dengan kebijakan baru yang didukung oleh UU, maka desa diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Dengan kesempatan tersebut, pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya dan berbagai sumber daya kekayaan alam yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan. Dengan begitu, semakin besar tanggung jawab yang diterima desa maka pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya agar pemerintah desa dapat mewujudkan harapan pemerintah dalam mencapai keberhasilan pembangunan di desa.

Banyaknya jumlah dana yang harus dikelola oleh desa tanpa diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas hal ini akan menjadikan penyalahgunaan wewenang atas dana yang diberikan. Seperti yang diketahui, desa tidak hanya mengelola dana desa dari APBN. Sesuai UU Desa pasal 72, desa memperoleh kucuran dana dari pemerintah daerah yaitu bantuan keuangan dari APBD Provinsi, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota, Pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD), pembagian hasil pajak daerah, retribusi daerah dan kekayaan yang dimiliki oleh desa itu sendiri serta pendapatan lain – lain yaitu berupa dana hibah. Sikap, sifat, etika dan kejujuran diuji. Apabila aparatur desa tidak dapat menjalankan amanah dari pemerintah atas dana yang diberikan untuk dapat memberdayakan desa, maka penyelewengan atau penyimpangan itu dapat terjadi.

Tindakan penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur desa ini dikenal dengan istilah kecurangan (*fraud*). Menurut *The Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat dalam Pratiwi (2016) mengungkapkan bahwa *fraud* adalah perbuatan – perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan oleh orang – orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. ACFE mengklasifikasikan *fraud* dalam beberapa klasifikasi dan lebih dikenal dengan istilah “*Fraud Free*” yaitu penyimpangan atas Assets (*Asset Misappropriation*), Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan (*Fraudulent Statement*) dan Korupsi (*Corruption*).

Penelitian kali ini, peneliti cenderung berpedoman pada teori fraud GONE. Teori fraud GONE ini dipopulerkan oleh Jack Bologna dalam buku *Fraud Auditing & Investigation* (Priantara, 2013). Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi pegawai di instansi sektor pemerintah desa untuk mengetahui kecenderungan terjadinya fraud serta faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud.

Penyebab fraud menurut Bologna dapat dijelaskan dengan teori GONE, dimana dalam teori ini terdapat 4 faktor yang mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang dalam hal ini berperilaku fraud. Keempat faktor tersebut adalah (a) Greed atau keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap pelaku (b) Opportunities atau kesempatan merupakan peluang untuk melakukan fraud, hal ini biasanya berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal yang lemah, kurangnya pengawasan dan atau penyalahgunaan wewenang. (c) Needs atau kebutuhan, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. (d) Exposures atau pengungkapan merupakan suatu tindakan atau akibat yang harus diterima oleh pelaku apabila ditemukan melakukan kecurangan. Penelitian ini berpedoman pada teori Fraud GONE, dikarenakan dalam penelitian ini variabel *greed*, *opportunities*, *need* dan *eksposur* sesuai dengan dasar teori *Fraud GONE* akan diproksikan dengan moralitas aparat, pengendalian interal, motivasi aparaturnya serta penegakan hukum.

Komponen dalam teori fraud GONE, *Greed* atau keserakahan dan *Need* atau kebutuhan merupakan faktor internal sedangkan *Opportunity* atau kesempatan dan *Exposure* atau pengungkapan merupakan faktor eksternal. Berdasarkan teori diatas, seseorang melakukan penyimpangan akibat dari sifat dalam diri pelaku yang serakah yang tidak pernah puas akan apa yang ia peroleh. Seperti halnya seorang pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi, sekaya apapun mereka apabila didalam hatinya tidak pernah merasa puas mereka akan menimbun kekayaan. Hal ini terbukti para koruptor di negara ini tidak pernah bosan untuk menimbun kekayaan sampai pada akhirnya terungkap kasusnya atau tertangkap tangan. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com))

Apabila kedua faktor internal tersebut muncul. Maka tidak menutup kemungkinan *opportunnity* atau kesempatan ini akan terjadi. Dengan adanya kesempatan maka tindak pidana korupsi, pencurian serta penyelewengan terjadi, yang akan merugikan keuangan negara dan akibatnya adalah kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)).

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016 – 10 Agustus 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata – rata dilakukan oleh Kepala Desa (tribunnews.com). Dalam kasus ini, jumlah kerugian negara mencapai 30 Miliar. Adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Menurut Kurniawan dalam Detik.com menyatakan bahwa sejumlah bentuk korupsi ada 5 titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, *monitoring* dan evaluasi, pelaksanaan dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan data yang dimuat dalam **Merdeka.com**, ICW memaparkan kasus korupsi terbanyak selama tahun 2016 berada di wilayah Jawa Timur dengan jumlah 64 kasus dan merugikan negara sebesar 325 miliar. Untuk sektor korupsi dan kerugian negara ada pada keuangan daerah, disusul pendidikan, dana desa, sosial kemasyarakatan, dan transportasi.

Berdasarkan data dari *pojokkiri.net* terdapat kasus korupsi yang terjadi di kabupaten Bondowoso. Kasus ini merupakan pengembangan perkara pada tahun 2015, penanganannya 2016. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2014 yang melibatkan Kepala Desa Wringin yaitu adanya dugaan tindak pidana korupsi atas pembangunan pasar wringin. Program pembangunan pasar tersebut merupakan program dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dari program tersebut desa memperoleh kucuran dana sebesar Rp 500 juta yang langsung di transfer ke rekening desa.

Pada tahun 2016, pengamat kebijakan dan realisasi anggaran di kabupaten Bondowoso menjelaskan bahwa sesuai hasil dari audit BPK, ada 8 kades dalam 2 kecamatan berbeda yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan potensi kerugian negara kurang lebih 100 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik penggunaan anggaran ADD dan DD 2016 (radarbesuki).

Berdasarkan kasus – kasus diatas hal tersebut merugikan kas di kabupaten Bondowoso. Peristiwa itu menjadikan Kabupaten Bondowoso perlu untuk



melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap desa – desa yang ada di Bondowoso. Hal ini untuk mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi.

Menurut data yang dimuat Kecamatan Pujer Dalam Angka menyatakan bahwa kecamatan Pujer merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Bondowoso. Letaknya dari pusat kota kurang lebih 12 km arah Timur Laut. Luas wilayah kecamatan Pujer sebesar 3.590,9 Ha. Wilayah Kecamatan Pujer terdiri atas 11 Desa, 73 Dusun, 63 RW dan 223 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 38.737 jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD, kecamatan pujer memperoleh pagu alokasi dana desa dan dana desa cukup besar senilai Rp. 5.303.137.357 dan 7.182.663.256,95. Selain itu pertumbuhan ekonomi di kecamatan Pujer mengalami peningkatan hal ini dibuktikan dengan peningkatan penyerapan anggaran di Kecamatan Pujer dari tahun 2015 ke tahun 2016 .

Penelitian mengenai kecurangan atau *fraud* ini dilakukan pada sektor pemerintah desa di Kabupaten Bondowoso karena belum banyak ditemui penelitian tentang kecurangan pada aparatur desa sehingga dengan adanya penelitian tentang kecurangan di Bondowoso diharapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan peraturan dan kebijakan di kabupaten Bondowoso telah berjalan baik sebagaimana yang diharapkan atau malah sebaliknya. Selain itu untuk mengetahui variabel – variabel yang mempengaruhi kecenderungan aparatur desa untuk melakukan penyimpangan atau kecurangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti memberi judul penelitian ini “**Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada Aparatur Pemerintah Desa di Kec. Pujer Bondowoso**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah moralitas berpengaruh terhadap *fraud* ?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* ?

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap *fraud* ?
4. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud* ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menguji pengaruh moralitas terhadap *fraud*
2. Mengidentifikasi dan menguji pengaruh pengendalian internal terhadap *fraud*
3. Mengidentifikasi dan menguji pengaruh motivasi terhadap *fraud*
4. Mengidentifikasi dan menguji pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud*

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

- a. Manfaat Teoritis
  1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu dan sebagai media dalam memecahkan atau menganalisis suatu permasalahan.
  2. Pengetahuan dan ilmu yang diberikan dalam bangku perkuliahan dapat diterapkan pada penelitian ini.
- b. Manfaat Praktis
  1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada instansi pemerintah di kecamatan Pujer dan Kabupaten Bondowoso
  2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang *fraud*.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Grand Teori

#### 2.1.1 *Fraud Gone*

Teori *gone* ini diperkenalkan oleh G. Jack Bologna. Menurut G. Jack Bologna (Priantara, 2013: 48 ) teori ini menggambarkan empat faktor pendorong seseorang melakukan *fraud*, yaitu :

- a. *Greed* (Keserakahan), menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *greed* merupakan sifat kerakusan, ketamakan dan selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. *Greed* berkaitan dengan perilaku keserakahan yang ada dalam diri individu tersebut (BPKP, 2008). Faktor individu ini berada di luar kendali perusahaan. Sifat serakah berkaitan dengan moral seseorang seperti karakter, integritas dan kejujuran yang berhubungan dengan *greed*. Sehingga peneliti memproksikan sifat serakah dengan moralitas aparatur.
- b. *Opportunity* (kesempatan), kesempatan merupakan peluang terjadinya *fraud* diakibatkan karena lemahnya atau tidak efektifnya kontrol sehingga membuka peluang terjadinya suatu kecurangan (Gagola, 2011 dalam Lailiyah 2016). *Opportunity* berkaitan dengan keadaan organisasi, sistem pengendalian internal yang lemah dan kurangnya kontrol atau pengawasan sehingga menimbulkan kesempatan untuk melakukan *fraud* (BPKP, 2008). Dalam teori segitiga *fraud*, *opportunity* merupakan salah satu elemen yang dapat diminimalisir akan terjadinya suatu *fraud*. Dalam teori *Gone*, *opportunity* merupakan faktor eksternal seseorang melakukan *fraud*. Dalam penelitian ini, peneliti akan memproksikan *opportunity* karena penngendalian internalnya.
- c. *Need* (kebutuhan), *need* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan (wikipedia.com). Kebutuhan dalam teori *gone* ini berkaitan dengan perihal apa saja yang dibutuhkan oleh masing – masing individu untuk memperoleh kehidupan yang wajar (BPKP, 2008). Menurut Bologna faktor kebutuhan merupakan faktor yang berhubungan dengan perilaku yang melekat

pada diri setiap individu. adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang melebihi dari kemampuan individu. Akibatnya individu tersebut termotivasi untuk melakukan kecurangan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Peneliti memproksikan *need* ini dengan motivasi. Karena motivasi berhubungan dengan kebutuuhan seperti memerlukan uang karena terlilit hutang atau gaya hidup yang mewah.

d. *Exposure* (pengungkapan), merupakan pengungkapan atas suatu kejadian dimana konsekuensi harus diterima pelaku apabila ditemukan adanya kecurangan (BPKP, 2008). Jika pelaku kecurangan terungkap, masih ada kemungkinan pelaku yang sama atau berbeda akan mengulangi kembali perbuatannya (BPKP, 2008). Oleh karena itu, pelaku kecurangan seharusnya mendapat sanksi sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Oleh karena itu, peneliti memproksikan variabel *eksposur* dengan penegakan hukum.

Faktor *Greed* dan *Need* berhubungan dengan individu pelaku sehingga hal ini sulit untuk dihilangkan atau dirubah. Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* berhubungan dengan organisasi. Dapat dikatakan, dalam teori ini terdapat faktor individu dan generik.

#### 1) Faktor generik

Kesempatan (*Opportunity*) untuk melakukan suatu tindakan *fraud* tergantung pada kedudukan pelaku terhadap obyek *fraud*. Kesempatan untuk melakukan *fraud* selalu ada pada setiap kedudukan. Kedudukan akan menentukan besar kecilnya pelaku untuk melakukan *fraud*. Secara umum manajemen suatu organisasi / perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan *fraud* daripada karyawan.

Pengungkapan (*Exposure*) suatu *fraud* tidak menjamin *fraud* tersebut tidak terulang kembali baik itu oleh pelaku yang sama maupun pelaku lainnya. Oleh karena itu, setiap pelaku *fraud* yang terungkap kasusnya diberi sanksi yang seimbang atas apa yang dilakukannya. Pengungkapan berarti juga apakah suatu *fraud* mudah terdeteksi dan terungkap. Semakin mudah terdeteksi dan terungkap

serta semakin tegas sanksinya maka pelaku yang ingin melakukan *fraud* harus berfikir ulang atau harus semakin canggih modus *fraud* yang digunakan.

## 2) Faktor Individu

Keserakahan disebut sebagai moral terendah manusia karena serakah bertalian dengan perbuatan *fraud* yang pasti sudah dilakukan secara berulang kali dan bukan merupakan sesuatu perbuatan yang salah serta sudah melampaui batas kebutuhan dasar manusia.

Motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan (*need*) mendorong pikiran dan keperluan pegawai atau pejabat yang memiliki akses dan otoritas atas aset yang dimiliki perusahaan/lembaga untuk melakukan tindakan *fraud*. Apabila seseorang itu merasa tertekan, maka orang tersebut cenderung untuk melakukan *fraud*. Apabila pelaku dan sesuai dengan sifat manusia dan hukum ekonomi bahwa *needs* adalah tidak terbatas dan apalagi faktor genetik sangat lemah maka awalnya adalah alasan kebutuhan (*need*) namun akan menjadi keserakahan (*greedy*).

### 2.1.2 Teori Agency

Teori agensi merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Karakteristik utama hubungan keagenan terletak pada kontrak pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari prinsipal kepada agen. Jensen dan Meckling, 1976 dalam Staryofe, 2012 menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas yang mengandalkan kontrak, baik eksplisit atau implisit, sebagai acuan pranata perilaku partisipan.

Entitas pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap partisipan. Meskipun cara kerja dan mekanisme hubungan antar partisipan dalam organisasi pemerintah berbeda dengan sektor korporasi, adanya ikatan formal menunjukkan adanya kontrak dalam organisasi.

Menurut Eisenhardt dalam Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi yaitu asumsi sifat manusia, asumsi keorganisasi dan asumsi informasi. Dalam sektor pemerintah,

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai partisipan akan bertindak untuk kepentingannya sendiri serta memandang bahwa pemerintah desa tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

## 2.2 Pengertian Persepsi

Menurut Sukirman dalam Mustikasari (2013) persepsi merupakan suatu fenomena atau rangsangan yang sama bisa menghasilkan persepsi dan penafsiran yang berbeda – beda pada individu yang berbeda. Sedangkan menurut Sulistyowati (2007:49) dalam Lailiyah persepsi merupakan cara bagaimana seseorang melihat dan menafsirkan suatu obyek atau kejadian. Dari pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan pandangan terhadap suatu obyek dan menafsirkannya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Contohnya, gambar lingkaran, setiap orang akan mempunyai persepsi yang berbeda antara satu sama lain. Ada yang mengartikan gambar lingkaran sebagai bulan, bumi, matahari, bola, angka nol dsb. Itu semua dapat terjadi tinggal dari sudut pandang mana seseorang itu melihatnya.

Persepsi individu terhadap suatu obyek terbentuk karena adanya peran dari perceiver, target dan situasi. Faktor yang mempengaruhi persepsi dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Lailiyah,2016). Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu tersebut misalnya seperti pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal merupakan berupa rangsangan itu sendiri dan faktor lingkungan dimana persepsi itu berlangsung.

## 2.3 Fraud

### 2.3.1 Pengertian Fraud

Menurut *Standar the Institute of Internal Auditors* tahun 2013 menyatakan bahwa *fraud* merupakan semua aktivitas atau kegiatan yang didasarkan dengan pengelabuhan atau pelanggaran atas kepercayaan yang diberikan untuk memperoleh aset, uang, jasa atau mencegah pembayaran guna memperoleh keuntungan secara pribadi ataupun kelompok. *Black's Law Dictionary Fraud* menguraikan pengertian *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemeriksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat.

Menurut Romney dan Steinbart (2014) dalam Pratiwi (2017), *fraud* adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain. Secara legal, untuk tindakan dikatakan curang maka harus ada :

- a. Pernyataan, persepsi, atau pengungkapan yang salah.
- b. Fakta material, yaitu sesuatu yang menstimulasi seseorang untuk bertindak.
- c. Niat untuk menipu.
- d. Kepercayaan yang dapat dijustifikasi (dibenarkan) ; dimana seseorang bergantung pada misrepresentasi untuk mengambil tindakan.
- e. Pencenderungan atau kerugian yang diderita oleh korban.

Sedangkan menurut Karyono (2013:4-5) dalam Afsari (2016) adalah :

“*Fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak – pihak lain, yang dilakukan oleh orang – orang baik dari dalam maupun luar organisasi.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun kelompok dengan

merugikan pihak lain. Terdapat aspek dari *fraud* yaitu penipuan (*deception*), ketidakjujuran (*dishonest*) dan niat (*intent*).

### 2.3.2 Jenis – Jenis Fraud

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), internal *fraud* (tindakan penyelewengan di dalam perusahaan atau lembaga) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. *Fraud* terhadap Aset (*Asset Misappropriation*)

*Fraud* terhadap aset merupakan penyalahgunaan terhadap aset perusahaan atau lembaga yang mana aset tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tanpa memperoleh ijin dari perusahaan atau lembaga. Aset perusahaan atau lembaga dapat berupa kas (uang tunai) dan non-kas. Menurut ACFE *Asset misappropriation* dikelompokkan menjadi 2 macam :

- 1) *Cash Misappropriation*, penyelewengan terhadap aset yang berupa kas. Misalnya pengeluaran kas, menahan cek pembayaran untuk vendor.
- 2) *Non – cash misappropriation*, penyelewengan terhadap aset yang berupa non kas. Misalnya menggunakan fasilitas perusahaan / lembaga untuk kepentingan pribadi.

b. *Fraud* terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*)

ACFE membagi jenis *fraud* ini menjadi 2 macam, yaitu *financial* dan *non-financial*. *Fraud* terhadap Laporan Keuangan merupakan manipulasi data yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atas laporan yang dibuat dengan tidak melaporkan seperti apa yang seharusnya (tidak sesuai realita) demi memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Misalnya memalsukan bukti transaksi, mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya, menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba, menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya, menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak kecil dibandingkan yang seharusnya.



c. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi merupakan bentuk kerjasama penyimpangan yang dilakukan lebih dari 1 orang demi memperoleh keuntungan dan menikmatinya secara bersama. ACFE membagi jenis korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- 1) Konflik kepentingan (*conflict of interest*) – Seseorang melakukan tindakan korupsi dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Dimana, kerjasama tersebut hanya menguntungkan dirinya sendiri. Jadi dapat dikatakan, bahwa terdapat hubungan istimewa antara seseorang dalam perusahaan dengan pihak lain.
- 2) Menyuap atau menerima suap, imbal-balik (*briberies and excoiation*) –suap atau apapun jenisnya merupakan tindakan sebuah kecurangan. Menyuap dan menerima suap merupakan tindakan *fraud*. Contohnya adalah menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan / lembaga, kolusi dalam tender tertentu.

## 2.4 Moralitas Aparatur

Menurut Noviriantini moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral. Kohlberg (1969) menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional*, tahapan *post-konventional*. Menurut hasil penelitian Liyanarachchi (2009) menunjukkan bahwa level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan seseorang memiliki level penalaran moral yang tinggi. Menurut Welton dalam Setiawan (2017), dalam setiap stage Kohlbergh, individu memiliki pandangan sendiri mengenai suatu “hal yang benar” menurut diri sendiri.

1. stage 1, apa yang benar merupakan apa yang menjadi kepentingan individu tersebut.
2. stage 2, individu dalam stage ini berfikir bahwa hal yang benar dapat berasal dari persetujuan maupun posisi tawar yang imbang.

3. Stage 3 hal yang benar berdasarkan pengharapan akan kepercayaan, loyalitas dan kepedulian dari teman – teman maupun keluarga.
4. Tahapan ke 4 menganggap hal yang benar memberikan kontribusi untuk masyarakat, grup atau instansi.
5. Stage 5 dan stage 6 menganggap bahwa kebenaran adalah mendasarkan diri pada prinsip – prinsip etis, persamaan hak manusia dan harga diri sebagai seorang makhluk hidup.

## 2.5 Pengendalian Internal

Dalam Teori Akuntansi dan organisasi, pengendalian internal diartikan sebagai suatu proses yang mempengaruhi manusia dan sistem teknologi informasi yang disusun untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi. Pengendalian internal adalah suatu teknik untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu lembaga guna mencapai tujuan yang ingin dituju serta mencegah dan melindungi terjadinya kecurangan atau penggelapan atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik berwujud ataupun tidak berwujud.

Dalam PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem pengendalian yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas lima elemen, yaitu :

### 1) Lingkungan pengendalian

Pimpinan dalam Instansi Pemerintah perlu menciptakan lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya (PP no. 60 tahun 2008 pasal 4) , melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

#### 2) Penilaian risiko

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pasal 13, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terhadap identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, maka Pimpinan Instansi menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan.

#### 3) Kegiatan pengendalian

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang berkaitan. Kegiatan pengendalian ini dilakukan supaya instruksi dari atasan dilaksanakan dan kegiatan pengendalian harus berjalan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

#### 4) Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam sarana dan bentuk serta tepat waktu sehingga pimpinan instansi pemerintah dapat melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

#### 5) Pemantauan Pengendalian Intern

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pasal 43 pemantauan pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan rewiuw lainnya.

## 2.6 Motivasi

Menurut Winardi (2011) motivasi seseorang bersumber dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang. Motivasi dalam diri yaitu keinginan untuk bertindak yang disebabkan oleh dorongan dari dalam diri seseorang, hanya orang tersebutlah yang mampu mengontrol dirinya. Motivasi dari luar adalah suatu dorongan untuk bertindak yang berasal atau terpengaruh dari rangsangan luar.

Menurut Siagian (2004) dalam Ade (2013), salah satu sasaran teori motivasi adalah pemenuhan kebutuhan manusia termasuk kebutuhan yang bersifat primer. Dilihat dari sudut pandang manajemen, motivasi anggota organisasi digolongkan menjadi dua jenis yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Menurut Siagian dalam Ade (2013) motivasi positif adalah suatu tindakan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan tingkat efisiensi, efektivitas, serta produktivitas yang tinggi. Motivasi negatif adalah suatu tindakan seseorang yang mengutamakan kepentingan pribadi guna mencapai tujuan dengan mengorbankan kepentingan bersama atau kelompok. Motivasi negatif timbul karena sikap dan etika yang diarahkan untuk mencapai kepentingan pribadi dan faktor – faktor ketidakmampuan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada seseorang tersebut. Motivasi serta kesempatan dapat mendorong seseorang untuk berbuat serakah.

Menurut teori hierarki kebutuhan yang dikenalkan oleh Abraham Maslow (Robbins, 2013) menyatakan bahwa kebutuhan terdiri atas lima tingkatan yaitu

### 1. Kebutuhan yang bersifat fisiologi

Manifestasi kebutuhan ini dapat dilihat dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Bagi karyawan, kebutuhan akan gaji, uang lembur, hadiah – hadiah dan fasilitas lainnya seperti rumah, kendaraan dll. Hal ini menjadikan dasar seseorang untuk bekerja secara efektif dan memiliki produktivitas yang tinggi terhadap organisasi.

### 2. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan kerja

Kebutuhan akan rasa aman, keselamatan kerja, ketentraman dan jaminan seseorang dalam kedudukannya, jabatan-nya, wewenangnya dan tanggung

jawabnya sebagai karyawan. Seseorang akan bekerja penuh antusias dan produktivitas apabila dalam pelaksanaan pekerjaannya memperoleh jaminan formal atas kedudukan dan wewenangnya.

### 3. Kebutuhan sosial

Kebutuhan akan kasih sayang dan persahabatan dapat mempengaruhi output dari pekerjaannya. Kebutuhan akan diikutsertakan, dengan memiliki hubungan sosial yang baik antar karyawan hal ini akan mengakibatkan relasi yang baik antar karyawan dan tumbuhnya rasa kebersamaan termasuk adanya sense of belonging dalam organisasi.

### 4. Kebutuhan akan prestasi atau penghargaan

Kebutuhan akan kedudukan dan promosi dibidang kepegawaian serta kebutuhan akan status seseorang dalam organisasinya.

### 5. Kebutuhan akan aktualisasi diri atau mempertinggi kapasitas kerja

Kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan hal yang wajar bagi seseorang untuk mengembakan kapasitas kerjanya dengan baik.

## 2.7 Penegakan Hukum

Menurut Raharjo (2008) dalam Pratiwi (2016), penegakan hukum merupakan penegakan ide – ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi, Penegakan hukum ini berfungsi untuk memberi hukuman atas perbuatan yang menyimpang dari seharusnya.

Instansi pemerintah yang bertugas mengelola dana dari pemerintah atau mendapatkan amanah untuk mengelola dana sesuai dengan visi dan misi daerah tersebut. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penegakan hukum yang dikembangkan oleh Sulastri (1997) dalam Zulkarnain (2013). Indikator pengukuran ini meliputi

- a. Ketaatan terhadap hukum
- b. Proses penegakan hukum
- c. Peraturan disiplin

- d. Disiplin kerja
- e. Tanggung jawab

## 2.8 Faktor Penyebab Terjadinya Fraud

Secara teoritis dikelompokkan menjadi 2 faktor penyebab seseorang melakukan tindak kecurangan yaitu kondisi lingkungan individu dan faktor internal organisasi.

### a. Kondisi Lingkungan Individu

Lingkungan individu merupakan salah satu penyebab atau faktor yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*. Seperti pepatah yang mengatakan, apabila kita bergaul dengan orang baik maka kita akan ikut baik dan sebaliknya apabila kita bergaul dengan orang buruk maka kita akan menjadi buruk pula. Penelitian menunjukkan bahwa *fraud* terjadi sebagai akibat adanya kombinasi adanya tekanan seseorang dengan lingkungan yang memungkinkan orang tersebut melakukan kecurangan.

Keadaan dan sifat/ karakter individu/seseorang yang mempengaruhinya untuk melakukan *fraud* adalah sifat tamak dan ingin mengejar kemewahan, moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan, penghasilan yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat diatasi dengan usaha/penghasilan normal, malas atau tidak mau bekerja keras, ajaran agama yang kurang diterapkan secara benar.

### b. Kondisi lingkungan organisasi / perusahaan.

Kondisi lingkungan organisasi / perusahaan tempatnya bekerja dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* antara lain kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang baik, sistem akuntabilitas yang kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, adanya kecurangan dari manajemen untuk menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasinya.

Kondisi lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi berada dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* yaitu nilai yang berlaku

di masyarakat yang ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi ( anggapan korupsi sebagai sesuatu yang lumrah), budaya yang menilai.

## 2.9 Fraud di Sektor Pemerintah Desa

Kecurangan yang sering terjadi di pemerintah desa yaitu korupsi. Korupsi menurut bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991 (KBBI) korupsi berarti busuk, palsu, atau suap. Dari sudut pandang hukum yaitu Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undangan Nomor 20 Tahun 1001, tindak pidana korupsi diklasifikasikan menjadi tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai berikut (pasal 2 s.d pasal 13) :

1. Perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian negara.
2. Perbuatan suap menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
7. Gratifikasi.

Istilah korupsi bukan hanya mark up atas pembelian barang dan jasa, tender pembangunan tetapi dalam sistem pemerintahan korupsi dapat diistilahkan sebagai uang pangkal, uang dibawah meja, uang pelicin dll. Selain itu bentuk kecurangan dalam pemerintahan desa bukan sebatas korupsi tetapi dapat berupa penyelewengan atas aset desa. Saat ini, banyak tindak pidana korupsi atau penyelewengan terjadi di desa sehingga menjadikan kepala desa sebagai tersangka dan dicopot dari jabatannya. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya sumber daya manusia, spi yang belum terprosedural, kontrol pengawasan dari pemerintah daerah dan pusat yang masih lemah. Dibuktikan dengan data tahun 2015 bahwa kontrol pengawasan terhadap dana yang diberikan desa di wilayah Jawa Timur hanya sekitar 5%.

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kecenderungan kecurangan dalam sistem pemerintah sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian diantaranya menurut Afsari (2016) yang meneliti tentang bagaimana persepsi pegawai pemerintah pada SKPD di kabupaten Jember tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kesesuaian kompensasi dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah sedangkan sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, budaya etis manajemen, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan disektor pemerintah. Apabila kompensasi yang diterima oleh pegawai semakin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat kecurangan seperti halnya yang terjadi pada komitmen organisasi.

Adinda (2015) melakukan penelitian tentang bagaimana persepsi para pegawai di instansi pemerintah kabupaten Klaten mengenai kecenderungan kecurangan yang terjadi di sektor pemerintah dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengendalian internal, kultur organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan serta tidak terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah kabupaten Klaten.

Penelitian kecenderungan kecurangan ini juga dilakukan oleh Pratama (2017) yang meneliti perilaku kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa dan menganalisis pengaruh *Fraud Diamond* dan *GONE Theory*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kesempatan, Rasionalisasi dan Kemampuan berpengaruh terhadap *academic fraud*. Sedangkan, Tekanan, Keserakahan, Kebutuhan dan Pengungkapan tidak berpengaruh terhadap *academic fraud*.

Penelitian kecenderungan kecurangan dilakukan oleh Aranta (2013) yang meneliti tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada pegawai SKPD yang ada di kota Sawahlunto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas aparatur berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan



kecurangan akuntansi, asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Setiawan (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh pengendalian internal, tekanan finansial, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan obyek penelitian pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan tekanan finansial berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan penalaran moral yang rendah dapat mengarah pada penipuan akuntansi.

Zaini (2015) melakukan penelitian analisis pengaruh teori *Diamond* dan *Gone Theory* terhadap *Academic Fraud* ( Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Se-Madura). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan, keserakahan, pengungkapan berpengaruh positif terhadap *academic fraud*, sedangkan kesempatan, rasionalisasi, kemampuan tidak berpengaruh terhadap *academic fraud* serta kebutuhan berpengaruh negatif terhadap *academic fraud*.

Penelitian Ismatuallah (2016) bertujuan untuk meneliti pengaruh teori *Gone fraud* terhadap *academic fraud* di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui faktor individu melakukan *academic fraud* yang variabelnya didasarkan pada teori *fraud gone*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keserakahan dan kebutuhan merupakan faktor internal dari dalam diri pelaku sehingga hal ini memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akademik apalagi jika sudah butuh ditambah dengan motivasi dan sikap serakah, maka seseorang akan cenderung untuk melanggarnya sedangkan faktor kesempatan dan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akademik.

Kurrohman (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menggali persepsi pegawai keuangan di SKPD kabupaten Situbondo tentang pengaruh kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, penegakan hukum, keefektifan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan komitmen organisasi terhadap kecurangan di sektor pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah.

Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah. Terdapat pengaruh positif antara budaya etis organisasi, komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan.

Zulkarnain (2013) penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi pegawai di instansi pemerintah mengenai pengaruh keefektifan sistem pengendalian interna, kesesuaian kompensasi, kultur organisasi, perilaku tidak etis, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal dan penegakan hukum terhadap fraud di sektor pemerintah. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal, kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di sektor pemerintah. Tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi, penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintah serta terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap *fraud* di sektor pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Wilopo (2006) bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi studi pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo menunjukkan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis manajemen dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal, moralitas manajemen, menghilangkan asimetri informasi serta ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Model Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siti Fitriani Afsari	Kesesuaian Kompensasi, Gaya Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal, Penegakan Peraturan, Budaya Etis Manajemen,	Regresi Linier Berganda ( <i>Multiple Linier Regretion</i> )	Kesesuaian kompensasi dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan sedangkan gaya kepemimpinan, sistem pengendalian

		Komitmen Organisasi		internal, penegakan peraturan, budaya etis manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah.
2.	Petra Zulia Aranta (2013)	Moralitas Aparatur, Asimetri Informasi	Analisis Regresi Linear Berganda	Moralitas aparatur berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
3.	Yanita Maya Adinda (2015)	Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kultur Organisasi, Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Peraturan, Keadilan Distribusif, Keadilan Prosedural dan Komitmen Organisasi.	SEM ( <i>Structural Equation Modeling</i> )	Terdapat pengaruh negatif antara Keefektifan Pengendalian Internal, Kultur Organisasi, Keadilan Prosedural, Komitmen Organisasi terhadap kecenderungan kecurangan. Terdapat pengaruh positif Keadilan Distributif terhadap kecenderungan kecurangan serta tidak terdapat pengaruh antara Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Peraturan terhadap Kecenderungan

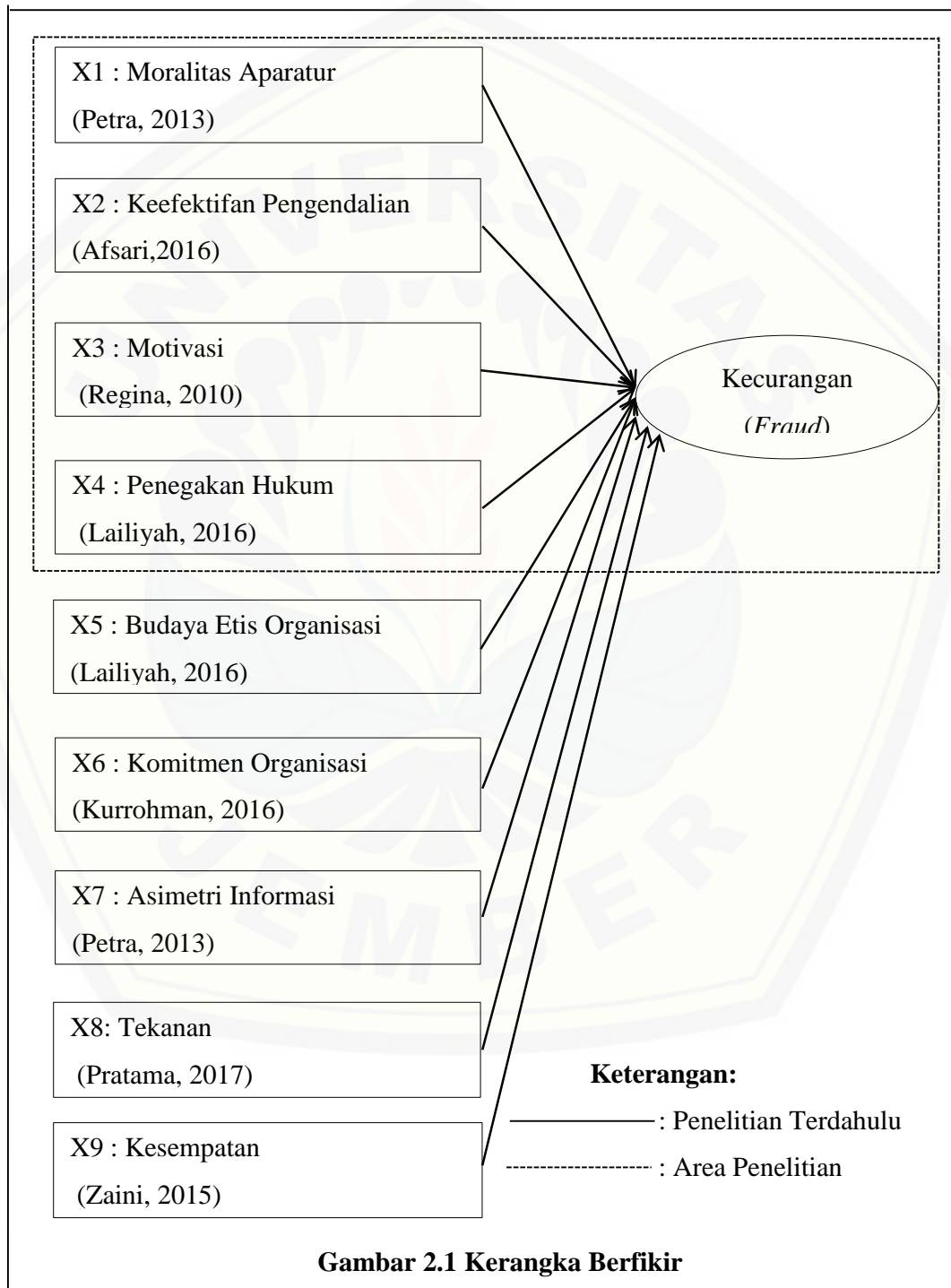
				Kecurangan.
4.	Reza Yuka Satria Pratama (2017)	Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kemampuan, Keserakahan, Kebutuhan, dan Pengungkapan.	Regresi Berganda	Kesempatan, Kemampuan dan Rasionalitas berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa sedangkan Tekanan, Keserakahan, Kebutuhan dan Pengungkapan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa.
5.	Mia Angelina Setiawan, Nayang Helmayunita (2017)	Pengendalian Internal, Tekanan Finansial, Moralitas Individu	ANOVA	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan tekanan finansial berpengaruh terhadap kecenderungan penipuan akuntansi sedangkan penalaran moral yang rendah dapat mengarah pada penipuan akuntansi.
6.	Mohammad Zaini, Anita Carolina dan Achdiar Redy Setiawan (2015)	Tekanan, Rasionalitas, Kesempatan, Kemampuan, Keserakahan, Kebutuhan, Pengungkapan.	Analisis Regresi Berganda	Tekanan, Keserakahan, Pengungkapan berpengaruh positif terhadap <i>academic fraud</i> Kesempatan, Rasionalisasi, Kemampuan tidak berpengaruh terhadap <i>academic fraud</i> . Kebutuhan berpengaruh negatif

				terhadap <i>academic fraud</i> .
7.	Ismet Ismastuallah dan Elan Eriswanto (2016)	Keserakahan, Kesempatan, Kebutuhan, Pengungkapan.	Analisis faktor konfirmasi atau <i>confirmatory factor analysis</i> (CFA)	Keserakahan dan Kebutuhan merupakan faktor internal dari dalam diri pelaku sehingga hal ini memiliki pengaruh terhadap kecurangan akademik apalagi jika sudah butuh ditambah motivasi dan sikap serakah, maka seseorang akan cenderung untuk melanggarnya sedangkan faktor kesempatan dan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik.
8.	Taufik Kurrohman (2016)	Kesesuaian Kompensasi, Keadilan Prosedural, Penegakan Hukum / Peraturan, Keefektifan Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi, Komitmen Organisasi.	Analisis Regresi Linear Berganda	Tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi, pengakan hukum, keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah. Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah. Terdapat pengaruh positif antara budaya etis organisasi, komitmen

				organisasi terhadap kecenderungan kecurangan.
9	Rifqi Mirza Zulkarnain (2013)	Keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, kultur organisasi, perilaku tidak etis, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal dan penegakan hukum	<i>SEM</i> (Structural Equation Models)	Terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal, kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintah. Tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi, penegakan hukum terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintah. Terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintah.
10	Wilopo (2006)	Perilaku tidak etis manajemen, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas manajemen.	<i>Structural Equation Models</i> AMOS 4	Kecenderungan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis manajemen dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal, moralitas manajemen, menghilangkan asimetri informasi serta ketaatan aturan akuntansi. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh

### 2.11 Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan dari penelitian terdahulu, maka kerangka berfikir dalam penelitian dapat disajikan dalam gambar 2.1 kerangka berfikir.



1. Variabel Moralitas (X1)  $\longrightarrow$  Kecenderungan kecurangan (Y) mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Petra (2013), dimana faktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan yaitu moralitas. Menurut teori Gane yang dikemukakan oleh G. Jack Bologna menyatakan bahwa faktor pendorong seseorang dalam melakukan tindak kecurangan yaitu *greed*. *Greedy* merupakan sifat serakah,kerakusan, ketamakan dan hendak memillii lebih dari yang dimiliki. Menurut BPKP (2008) *greedy* berkaitan dengan perilaku keserakahan yang ada dalam diri individu tersebut. Sifat serakah berkaitan dengan moral seseorang. Sehingga, peneliti memilih variabel moralitas untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada aparatur pemerintah desa di kecamatan Pujer Bondowoso

2. Variabel Pengendalian Internal (X2)  $\longrightarrow$  Kecenderungan kecurangan (Y) mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Afsari (2016), dimana faktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan yaitu keefektifan pengendalian internal. Berdasarkan teori Gane yang dikemukakan oleh G. Jack Bologna yang menyatakan bahwa faktor pendorong seseorang dalam melakukan tindak kecurangan yaitu *opportunity*. Dalam teori Gane, *opportunity* merupakan peluang terjadinya *fraud* diakibatkan karena lemahnya atau tidak efektifnya pengendalian internal sehingga mengakibatkan terjadinya kecurangan. Sehingga peneliti memilih variabel pengendalian internal untuk menguji faktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada aparatur pemerintah desa di kecamatan Pujer Bondowoso

3. Variabel Motivasi (X3)  $\longrightarrow$  Kecenderungan kecurangan (Y) mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Regina (2010), dimana faktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan yaitu Motivasi akan pemenuhan kebutuhan. Dalam teori Gane menjelaskan bahwa faktor pendorong generik(internal) individu melakukan kecurangan yaitu *need*. Menurut Bologna faktor kebutuhan merupakan faktor yang berhubungan dengan perilaku yang melekat pada diri setiap individu hanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang melebihi dari kemampuan individu. Akibat adanya motivasi dalam diri untuk memenuhi kebutuhan diluar kemampuan sehingga individu tersebut



melakukan kecurangan. Sehingga peneliti memilih variabel motivasi untuk menguji faktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada aparatur pemerintah desa di kecamatan Pujer Bondowoso.

4. Penegakan Hukum → Kecenderungan kecurangan (Y) mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah (2016), dimana faktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan yaitu Penegakan Hukum. Berdasarkan teori Gane yang dikemukakan oleh G. Jack Bologna faktor pendorong individu melakukan tindak kecurangan yaitu *eksposure*. *Eksposure* merupakan pengungkapan atas suatu kejadian dimana konsekuensi harus diterima pelaku apabila ditemukannya kecurangan. *Eksposure* berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yang rendah. Sehingga peneliti akan memproksikan faktor pendorong dalam teori *gone* yaitu *eksposure* dengan penegakan hukum. Sehingga peneliti memilih variabel penegakan hukum untuk menguji faktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada aparatur pemerintah desa di kecamatan Pujer Bondowoso.

## 2.12 Perumusan Hipotesis

Menurut Kerlingen (2014:131) menyatakan hipotesis adalah suatu dugaan sementara antara hubungan dua atau lebih variabel. Selain itu, hipotesis menurut Sax (2014:131) yaitu suatu *statement* mengenai hubungan yang diharapkan antara dua atau lebih variabel. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

### 2.1.8.1 Moralitas dan kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa kecamatan Pujer Bondowoso

Menurut Noviriantini moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral. Welton (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu untuk menyelesaikan *problem* etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Berdasarkan teori perkembangan moral Kohlbergh (Welton, 1994) menyatakan bahwa penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo dan Noviriantini menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Artinya, semakin tinggi level penalaran moral individu maka semakin rendah pula orang tersebut melakukan kecurangan. Apabila individu tersebut memiliki level moral yang rendah dan ketika itu terdapat tekanan akan kebutuhan *financial* maka individu tersebut cenderung untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Namun, jika individu tersebut memiliki level moral yang tinggi, mereka dalam bertindak akan cenderung untuk mendahulukan kepentingan orang – orang disekitarnya dan setiap tindakannya berlandaskan prinsip – prinsip moral. Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah

H<sub>1</sub> : Moralitas aparaturnya berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan

#### **2.1.8.2 pengendalian internal dan kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa kecamatan Pujer Bondowoso**

Pengendalian internal merupakan suatu teknik untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu lembaga guna mencapai tujuan yang ingin dituju serta mencegah dan melindungi terjadinya kecurangan atau penggelapan atas sumber daya yang dimiliki oleh organisasi baik berwujud maupun tidak berwujud.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Fitriani Afsari (2016), Afidatul Laili (2016) dan Wilopo menunjukkan hasil yang sama bahwa pengendalian internal memberikan pengaruh negatif terhadap kecurangan atau *fraud*. Pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Oleh karena itu, jika pengendalian internal dalam organisasi tersebut berjalan efektif, maka kesempatan untuk melakukan *fraud* dapat dikurangi. Berdasarkan teori *fraud triangel* menyatakan bahwa kesempatan pegawai atau karyawan untuk melakukan *fraud* ditandai dengan sistem pengendalian internal dari perusahaan yang lemah. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah

H<sub>2</sub> : Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

### **2.1.8.3 Motivasi dan kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa kecamatan Pujer Bondowoso.**

Menurut kartono (2002) motivasi adalah sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang mendorong manusia untuk bertindak. Menurut Bologna (2013) dalam teori GONE, motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan dikarenakan faktor kebutuhan. Menurut Siagian (2004) salah satu sasaran teori motivasi adalah pemuas kebutuhan manusia termasuk kebutuhan primer. Syahraini dkk (2010), menyatakan bahwa perilaku merupakan cerminan dalam diri seseorang, sehingga dari situlah dapat dilihat seberapa tinggi moral dan etika seseorang. Perilaku seseorang awalnya ditandai dengan adanya suatu kebutuhan. Kebutuhan – kebutuhan tersebut akan menimbulkan motivasi untuk melakukan sesuatu yang baik ataupun buruk.

Penelitian yang dilakukan Pria Agung (2017) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi negatif karyawan atau pegawai untuk berbuat kecurangan, maka semakin tinggi juga tingkat kecurangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah

H<sub>3</sub> : Motivasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

### **2.1.8.4 Penegakan Hukum dan kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa kecamatan Pujer Bondowoso.**

Penegakan hukum atau peraturan menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atas penyimpangan terhadap peraturan perundang – undangan atau yang disebut dengan tindakan melawan hukum (Assiddiqie, 2006 dalam Lailliyah 2016). Kecurangan merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum. Dengan adanya hukum yang tegas, maka tindak kecurangan yang dilakukan dapat terungkap. Dengan terungkapnya kasus kecurangan tersebut mengakibatkan pelaku kecurangan memperoleh konsekuensinya yang sepadan. Semakin patuh terhadap hukum yang berlaku maka akan semakin sedikit

kecurangan tersebut. Dan juga semakin tegas hukum yang berlaku, maka akan semakin besar kasus kecurangan yang akan terungkap.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah (2016) menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap persepsi kecurangan di instansi pemerintah. Hasil tersebut tidak mendukung teori yang ada, bahwa semakin baik penegakan hukum maka akan semakin rendah kecurangan yang akan terjadi. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

H<sub>4</sub> : Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.



### BAB 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan statistik sebagai alat analisis utama. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:23) menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif karena dalam penelitian ini hasil pengujian data digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu wilayah yang generalisasi terdiri atas subyek atau obyek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa di kecamatan Pujer Bondowoso. Sampel merupakan bagian dari populasi. Menurut Sugiyono (2008:62) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Yusuf (2014:150) sampel merupakan sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Pengambilan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling* Pemilihan metode ini dikarenakan peneliti mempunyai tujuan tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak (Indriantoro dan Supomo, 2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi aparat desa terhadap kecenderungan kecurangan. Berikut kriteria pengambilan sampel

- a. Dalam pengambilan sampel desa, ditentukan setiap desa di kecamatan Pujer memiliki Pagu ADD lebih dari Rp. 490.182.462,635. Hal ini dikarenakan peneliti memberikan bobot pada masing – masing besaran ADD yang diperoleh oleh setiap desa.
- b. Menjabat sebagai aparatur desa lebih dari satu atau sama dengan satu tahun

- c. Menjabat sebagai aparatur desa yaitu Kepala Desa sebagai pejabat yang berwenang dalam memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dalam UU Desa Bagian Kelima Perangkat Desa Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Karena jabatan – jabatan tersebut memiliki fungsi penting dalam sistem pemerintahan di desa.

**Tabel 3.1 Sampel Penelitian**

Jabatan	Jumlah
Kades	4
Sekdes	4
Pelaksana Kewilayahan (Kaur Pemerintah, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Kesra, Kaur Pembangunan)	28
Pelaksana Teknis (Kasun)	39
Jumlah	75

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data subyek. Data subyek merupakan jenis data yang diperoleh berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian atau responden (Indriantoro dan Supomo, 2014). Data penelitian adalah respon dari responden secara tertulis (kuesioner) yang diberikan oleh peneliti sebagai tanggapan atau pertanyaan tertulis yang telah diajukan.

Sumber data penelitian ini merupakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek tanpa melalui perantara (Indriantoro dan Supomo, 2014). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan opini dari responden secara individual.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan metode survey. Menurut Puspitaningtyas (2013:4) dalam Lailiyah (2016) menyatakan bahwa metode penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan – hubungan antar variabel. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014) metode survey merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan secara lisan dan tertulis.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan peneliti adalah menggunakan kuesioner, yang mana kuesioner ini diberikan langsung pada aparatur desa di kecamatan Pujer Bondowoso. Kuesioner yang diberikan berisi pertanyaan – pertanyaan yang sederhana serta disertai petunjuk dalam pengisian kuesioner sehingga akan memudahkan responden dalam mengisi kuesioner yang telah diberikan. Selain itu, penjelasan juga akan secara langsung disampaikan kepada responden agar terdapat interaksi antara peneliti dengan responden dan hasil akhir dari pengisian kuesioner bisa langsung dikembalikan kepada peneliti.

Kuesioner yang digunakan menggunakan skala Likert (*Likert scale*) dengan skor 1-5. Skala Likert merupakan metode mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ke-tidaksetujuan-nya terhadap subyek, obyek, atau kejadian tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014). Menurut Aprilia dan Ghozali (2013:17) menyatakan bahwa skal likert tidak hanya digunakan untuk mengukur sikap tetapi juga digunakan untuk mengukur opini, personalitas dan menggambarkan kehidupan maupun lingkungan seseorang. Penilaian variabel pengendalian internal, motivasi, penegakan hukum dan kecenderungan kecurangan dalam kuesioner ini sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Pengukuran Skala *Likert***

No	Kategori Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Namun, penilaian untuk variabel moralitas berbeda dengan ketiga variabel independen dan variabel dependen. Hal ini dikarenakan variabel moralitas memiliki arah yang negatif sehingga penilaian variabel moralitas dalam kuesioner ini sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Pengukuran Skala *Likert* Variabel Moralitas**

No	Kategori Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	1
2	Setuju (S)	2
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	4
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	5

### 3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif berupa faktor – faktor kecurangan berdasarkan teori *fraud gone* terhadap proksi – proksi yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan pada aparatur desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independent yaitu komponen teori *fraud gone* adalah *greedy, opportunity, need, eksposur* yang masing – masing komponen diproksikan oleh moralitas aparatur, pengendalian internal, motivasi karyawan, dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.



### 3.5.1 Variabel Dependen

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014) variabel dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan. *Black's Law Dictionary Fraud* (2013:3) menguraikan pengertian *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemeriksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat. Indikator persepsi aparatur desa terhadap kecenderungan kecurangan meliputi :

#### a. Kecurangan laporan keuangan

Merupakan manipulasi data atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan terdiri atas :

1. Manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan
2. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan
3. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

#### b. Penyalahgunaan aset

Penyalahgunaan aset atau penggelapan atas aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak seharusnya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya penggelapan tanda terima barang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar harga barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas.

#### c. Korupsi

Individu melakukan kecurangan seringkali dikarenakan adanya suatu tekanan atau dorongan untuk melakukan kecurangan dan adanya peluang yang

dirasakan individu untuk melakukan kecurangan. Hal ini mengakibatkan individu tersebut melakukan tindak kecurangan.

d. Ketiadaan bukti transaksi

Penyalahgunaan atau penggelapan terhadap aset dalam point b dapat menimbulkan perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva entitas yang dapat disertai dengan catatan atau doumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara pegawai dalam organisasi dan di luar organisasi

e. Penyalahgunaan anggaran

Kecurangan dalam bentuk penyalahgunaan anggaran dilakukan dengan cara memperlakukan kas secara tidak semestinya dapat mencoba menyembunyikan tindakan pencurian mereka dengan memalsu tanda tangan atau menciptakan pengesahan elektronik yang tidak sah di atas dokumen otorisasi pengeluaran kas.

Pengukuran ini terdiri atas sembilan pertanyaan yang dikembangkan dari SPAP,seksi 316 IAI,2001 dalam Lailiyah, 2016 dan diukur menggunakan skala *Likert* (1) sangat setuju sampai (5) sangat tidak setuju.

### 3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan sebuah variabel yang memiliki pengaruh terhadap perubahan variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif serta negatif terhadap variabel dependen (terikat) (Sugiyono,2013) . Dalam penelitian kali ini yang menjadi variabel bebas adalah variabel yang didasarkan atas teori *Fraud Gone* yaitu *greed* yang diproksikan melalui moralitas aparatur, *opportunity* yang diproksikan dengan pengendalian internal, *need* yang diproksikan dengan motivasi karyawan serta *eksposur* yang diproksikan dengan penegakan hukum.

a. Moralitas Aparatur

Menurut Noviriantini moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral. Moralitas aparatur merupakan cerminan sikap dan sifat seseorang dalam

melakukan tindakan. Moralitas mengacu pada nilai – nilai kepribadian, kode etik atau sikap yang dapat membedakan benar atau salah. Dalam sistem pemerintahan desa moralitas sangat berkaitan erat dengan sifat dan kepribadian seseorang dalam melakukan tindakan. Sehingga, moralitas berperan aktif sebagai pemegang komitmen penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan konstitusi, yang berpihak pada kepentingan rakyat, transparan, akuntabel dan tidak korup. Pengukuran ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Petra (2013) yang terdiri atas enam item pertanyaan. Pengukurannya menggunakan skala *likert* (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat setuju. Indikator pengukuran persepsi aparatur desa terhadap moralitas aparatur meliputi :

1. stage 1, apa yang benar merupakan apa yang menjadi kepentingan individu tersebut.
2. stage 2, individu dalam stage ini berfikir bahwa hal yang benar dapat berasal dari persetujuan maupun posisi tawar yangimbang.
3. Stage 3 hal yang benar berdasarkan pengharapan akan kepercayaan, loyalitas dan kepedulian dari teman – teman maupun keluarga.
4. Tahapan ke 4 menganggap hal yang benar memberikan kontribusi untuk masyarakat, grup atau instansi.
5. Stage 5 dan stage 6 menganggap bahwa kebenaran adalah mendasarkan diri pada prinsip – prinsip etis, persamaan hak manusia dan harga diri.

b. Pengendalian Internal

Dalam Teori Akuntansi dan organisasi, pengendalian internal diartikan sebagai suatu proses yang mempengaruhi manusia dan sistem teknologi informasi yang disusun untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang dikembangkan dari UU No. 60 tahun 2008 yang terdiri atas delapan pertanyaan dan pengukurannya menggunakan skala *Likert* (1) sangat tidak setuju samai (5) sangat setuju. Pengendalian internal merupakan sistem pengendalian internal yang dilakukan secara menyeluruh dalam pemerintah daerah . Menurut UU No. 60 taun 2008 terdapat lima unsur

pengendalian internal yang dijadikan indikator pengukuran persepsi aparatur desa terhadap pengendalian internal yaitu

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko
- c. Aktivitas pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan

c. Motivasi

Menurut Bologna (2013) dalam teori GONE, motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan dikarenakan faktor kebutuhan. Menurut Winardi (2011) motivasi seseorang bersumber dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang. Motivasi dalam diri yaitu keinginan untuk bertindak yang disebabkan oleh dorongan dari dalam diri seseorang, hanya orang tersebutlah yang mampu mengontrol dirinya. Motivasi dari luar adalah suatu dorongan untuk bertindak yang berasal atau terpengaruh dari rangsangan luar

Pengukuran ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh regina (2010) yang terdiri atas lima pertanyaan. Pengukurannya menggunakan skala *Likert* (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat setuju. Teori motivasi yang paling terkenal adalah Abraham Maslow. Dalam hipotesisnya mengatakan bahwa dalam diri manusia bersemayam lima jenjang kebutuhan (Maslow, dalam Robbins, 2006) yang menjadi indikator pengukuran persepsi aparatur desa terhadap motivasi karyawan yaitu :

- 1) Fisiologi : yaitu rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian dan perumahan) seks, dan kebutuhan jasmani lainnya
- 2) Keamanan : yaitu keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional.
- 3) Sosial : antara lain kasih sayang, rasa memiliki, diterima baik dan persahabatan.

- 4) Penghargaan : mencakup faktor penghormatan diri seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor penghormatan dari luar misalnya status, pengakuan dan perhatian.
- 5) Aktualisasi diri : dorongan untuk menjadi seseorang / sesuatu sesuai ambisinya yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan diri.

d. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan penegakan ide – ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penegakan hukum terdiri atas lima item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian zulkarnain (2013) dalam Siti Fitriani Afsari. Respon dari responden diukur dengan skala Likert 1 – 5. Pengukuran persepsi aparat desa terhadap penegakan hukum diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a. ketaatan terhadap hukum.
- b. proses penegakan hukum.
- c. Peraturan organisasi
- d. Disiplin kerja.
- e. Tanggung jawab.

### 3.5.3 Pengukuran kategori variabel Moralitas Aparatur

1. Rentang

Skor nilai maksimal adalah 6 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 30

Skor nilai minimal adalah 6 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 6

2. Banyaknya kelas

Sesuai dengan jumlah skala Likert dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas yang diinginkan adalah 5

3. Panjangnya kelas interval

$$P = \frac{\text{rentang} + 1}{\text{banyaknya kelas}}, \text{ maka } P = \frac{(30 - 6) + 1}{5} = 5$$

Maka panjang kelas interval variabel moralitas aparatur adalah 5.

**Tabel 3.4** Kategori Variabel Moralitas Aparatur

No	Inteval	Kategori
1	6 – 10	Sangat Tidak bermoral
2	11 – 15	Tidak bermoral
3	16 – 20	Cukup bermoral
4	21 – 25	Bermoral
5	26 – 30	Sangat bermoral

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

### 3.5.4 Pengukuran kategori variabel Pengendalian Internal

1. Rentang

Skor nilai maksimal adalah 8 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 40

Skor nilai minimal adalah 8 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 8

2. Banyaknya kelas

Sesuai dengan jumlah skala Likert dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas yang diinginkan adalah 5

3. Panjangnya kelas interval

$$P = \frac{\text{rentang} + 1}{\text{banyaknya kelas}}, \text{ maka } P = \frac{(40 - 8) + 1}{5} = 6.6 \text{ dibulatkan menjadi } 7$$

Maka panjang kelas interval variabel pengendalian internal adalah 7.

**Tabel 3.5** Kategori Variabel Pengendalian Internal

No	Inteval	Kategori
1	6 – 12	Sangat Tidak Efektif
2	13 – 19	Tidak Efektif
3	20 – 26	Cukup Efektif
4	27 – 33	Efektif
5	34 – 40	Sangat efektif

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

### 3.5.5 Pengukuran kategori variabel Motivasi

#### 1. Rentang

Skor nilai maksimal adalah 5 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 25

Skor nilai minimal adalah 5 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 5

#### 2. Banyaknya kelas

Sesuai dengan jumlah skala Likert dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas yang diinginkan adalah 5

#### 3. Panjangnya kelas interval

$$P = \frac{\text{rentang} + 1}{\text{banyaknya kelas}}, \text{ maka } P = \frac{(25 - 5) + 1}{5} = 4.2 \text{ dibulatkan menjadi } 5$$

Maka panjang kelas interval variabel motivasi adalah 5.

**Tabel 3.6** Kategori Variabel Motivasi

No	Inteval	Kategori
1	1 – 5	Sangat Tidak Termotivasi
2	6 – 10	Tidak Termotivasi
3	11 -15	Cukup Termotivasi
4	16 – 20	Termotivasi
5	21 – 25	Sangat Termotivasi

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

### 3.5.6 Pengukuran kategori variabel Penegakan Hukum

1. Rentang

Skor nilai maksimal adalah 5 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 25

Skor nilai minimal adalah 5 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 5

2. Banyaknya kelas

Sesuai dengan jumlah skala Likert dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas yang diinginkan adalah 5

3. Panjangnya kelas interval

$$P = \frac{\text{rentang} + 1}{\text{banyaknya kelas}}, \text{ maka } P = \frac{(25 - 5) + 1}{5} = 4.2 \text{ dibulatkan menjadi } 5$$

Maka panjang kelas interval variabel penegakan hukum adalah 5.

**Tabel 3.7** Kategori Variabel Penegakan Hukum

No	Inteval	Kategori
1	1 – 5	Sangat Tidak Tegak
2	6 – 10	Tidak Tegak
3	11 -15	Cukup Tegak
4	16 – 20	Tegak
5	21 – 25	Sangat Tegak

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

### 3.5.7 Pengukuran kategori variabel Kecurangan (*Fraud*)

1. Rentang

Skor nilai maksimal adalah 9 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 45

Skor nilai minimal adalah 9 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 9

2. Banyaknya kelas

Sesuai dengan jumlah skala Likert dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas yang diinginkan adalah 5

3. Panjangnya kelas interval



$$P = \frac{\text{rentang} + 1}{\text{banyaknya kelas}}, \text{ maka } P = \frac{(45-9)+1}{5} = 7.4 \text{ dibulatkan menjadi } 8$$

Maka panjang kelas interval variabel *fraud* adalah 8.

**Tabel 3.8** Kategori Variabel *Fraud*

No	Inteval	Kategori
1	6 – 13	Sangat Jarang Terjadi
2	14 – 21	Jarang Terjadi
3	22 – 29	Cukup
4	30 – 37	Sering Terjadi
5	38 – 45	Sangat Sering Terjadi

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* statistika SPSS versi 23. Analisis regresi linear berganda ini menggambarkan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah hubungan tersebut positif atau negatif dan guna memperkirakan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau ratio (Afsari, 2016). Dimana jumlah variabel indenpenden yang digunakan berjumlah 4 (lebih dari 1).

Berdasarkan model penelitian diatas maka perumusan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

$Y$  = Fraud

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien regresi

$X_1$  = Moralitas

$X_2$  = Pengendalian Internal

$X_3$  = Motivasi

$X_4$  = Penegakan Hukum

$e$  = kesalahan regresi

### 3.6.1 Metode Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan suatu metode tentang pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Menurut Sugiyono (2016:29) menyatakan bahwa statistik deskriptif merupakan suatu analisis yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel / populasi sebagaimana adanya. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:170) statistik deskriptif biasanya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan biasanya berupa nilai minimal, nilai maksimal, rata – rata dan standar deviasi.

### 3.6.2 Uji Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda (*multiple linier regression*). Menurut Kotler dalam Ekaning (2017), analisis regresi linier berganda adalah suatu metode analisis statistika yang menggunakan model matematika tertentu yang terdiri atas beberapa buah asumsi. Hasil dari penggunaan alat statistika regresi linier berganda akan mempunyai nilai (*valid*) apabila asumsi yang digunakan dapat diterima. Sehingga, semua asumsi yang digunakan harus diuji keabsahannya untuk menguji validitas model. Uji keabsahan dilakukan dengan menggunakan uji kualitas yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

### 3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu alat yang digunakan untuk menguji sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner dimana kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52 dalam Afsari 2016). Menurut Afsari (2016) Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing – masing skor indikator dengan total skor konstruk. Dasar pengambilan keputusan, angket dinyatakan valid yaitu

1. jika nilai Person Correlation  $>0,5$
2. Jika nilai signifikan  $<0,05$

### 3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47 dalam Afsari, 2016). Reliabilitas berbeda dengan validitas karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedang yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Dengan demikian , reliabilitas mencakup dua hal utama, yaitu: stabilitas ukuran dan konsistensi internal ukuran (Sekaran, 200:205-7 dalam Ekaning 2017). Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini adalah *Cronbach Alpha*. Kriteria pengujian adalah jika koefisien alpha ( $\alpha$ )  $>0,6$  maka instrumen yang digunakan dikatakan reliabel.

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.6.3.1 Uji Normalitas Data

Pengujian ini dilakukan guna mengetahui apakah dalam model regresi, *error* yang dihasilkan mempunyai retribusi atau tidak (Afsari, 2016). Model

regresi yang baik yaitu yang model regresinya memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

a. *Kolmogorov Smirnov*

Pengujian normalitas dengan *kolmogorov smirnov* akan menunjukkan data terdistribusi normal ketika nilai sig  $>0,05$  dan sebaliknya ketika nilai sig  $<0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal.

### 3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Afsari (2016) tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali 2016:103 dalam Afsari, 2016). Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal maksudnya variabel bebas yang berkorelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ekaning, 2017). Multikolinearitas dapat dideteksi menggunakan besaran *Variance Inflation Factor (VIF)*. Suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas ketika nilai VIF  $<10$ , Apabila nilai VIF  $>10$  maka dapat disimpulkan model regresi tersebut memiliki masalah multikolinearitas (Afsari, 2016).

### 3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Afsari (2016) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakseimbangan dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan dan pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan sebaliknya jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan scatterplot. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan

scatterplot. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatterplot. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik – titik menyebar secara acak diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi heterokedastisitas (Lailiyah, 2016).

### 3.6.4 Uji Hipotesis

Setelah pengujian yang dilakukan diatas dinyatakan dapat diterima, maka langkah selanjutnya adalah pengujian atas hipotesis. Hasil pengujian hipotesis akan digunakan untuk menarik kesimpulan atas hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Terdapat tiga pengujian yang akan dilakukan pada tahapan ini yaitu :

#### 3.6.4.1 Uji F (Uji Model)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Moralitas ( $X_1$ ), Pengendalian Internal ( $X_2$ ), Motivasi ( $X_3$ ), Penegakan Hukum ( $X_4$ ) terhadap fraud (Y). Untuk mengetahui signifikan atau tidak variabel bebas terhadap variabel terikat dapat menggunakan SPSS. *Significance level* yang digunakan adalah 0,05, apabila *significance level* >0,05 maka hipotesisi ditolak (variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dan sebaliknya (Afsari,2016).

#### 3.6.4.2 Uji t

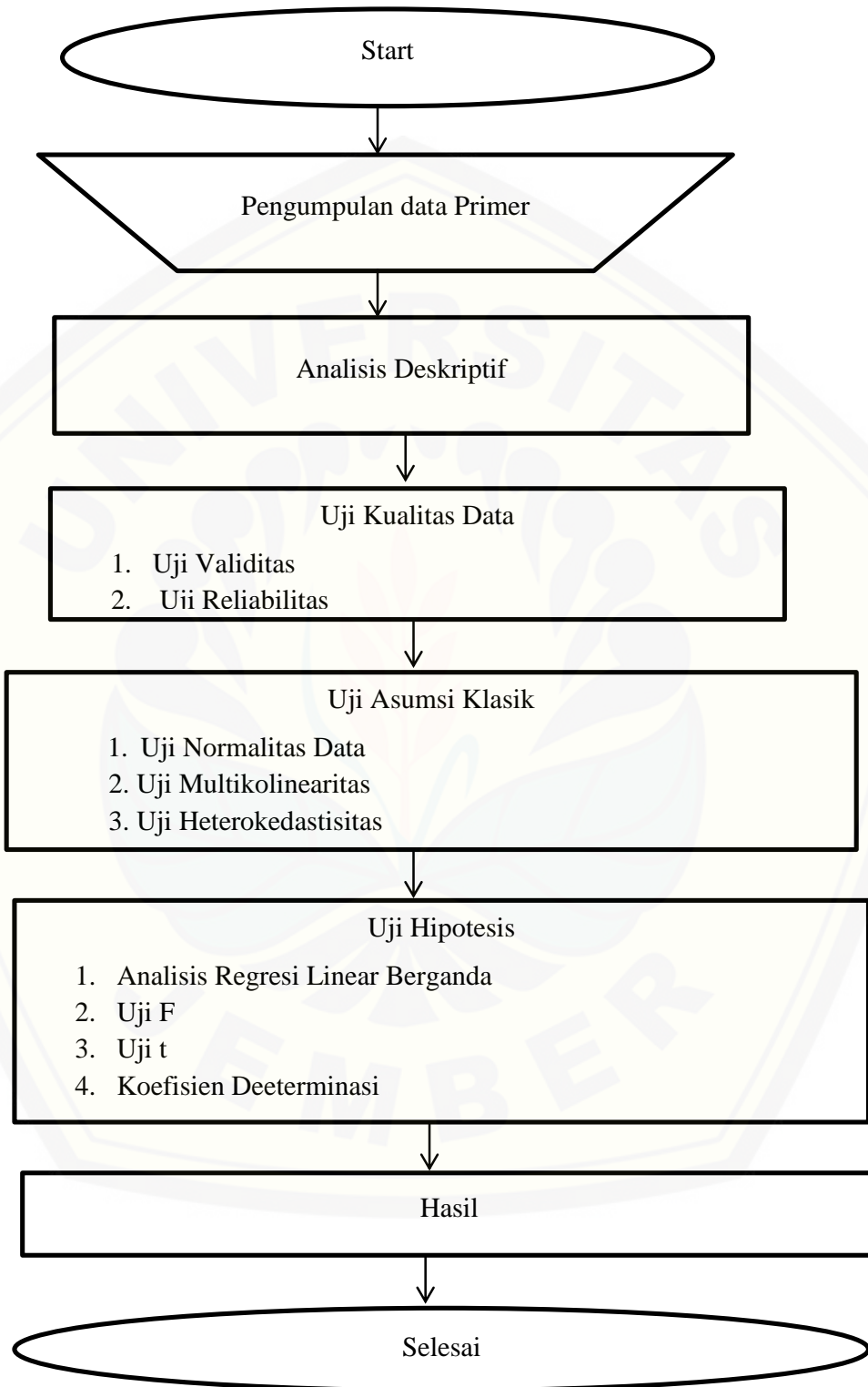
Tujuan digunakan uji t ini adalah untuk mengetahui variabel independen secara parsial (sendiri – sendiri)apakah berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menguji Moralitas ( $X_1$ ) terhadap fraud (Y), Pengendalian Intenal ( $X_2$ ) terhadap fraud (Y), Motivasi ( $X_3$ ) terhadap fraud (Y), dan Penegakan Hukum ( $X_4$ ) terhadap fraud(Y). Pengujian dilakukan dengan *significance level*

0,05. Jika *significance level* berada diatas 0,05 maka hipotesis ditolak atau dapat diartikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Afsari,2016).

#### 3.6.4.3 Koefisien Determinasi

Menurut Imam Ghozali (2009) Koefisien Determinasi intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. Koefisien determinasi dilambangkan dengan  $R^2$ . Semakin tinggi nilai  $R^2$  dari model regresi maka hasil regresi semakin baik. Nilai  $R^2$  mendekati 1 berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005:83 dalam Afsari,2016). Kelemahan dalam penggunaan koefisien determinasi adalah bias antara jumlah variabel independen. Setiap tambahan satu variabel independen akan meningkatkan nilai  $R^2$  tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ) namun menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R<sup>2</sup>*), karena *adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model lain (Afsari,2016).

**3.7 Kerangka Pemecahan Masalah**



**Gambar 2 2 kerangka pemecahan masalah**

## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah aparatur/perangkat desa di Kecamatan Pujer Bondowoso. Jumlah desa di kecamatan pujer sebanyak 11 desa yaitu desa Mengok, Sukowono, Sukokerto, Sukodono, Maskuning Wetan, Maskuning Kulon, Kejayan, Randucangkring, Padasan, Alas sumur, dan Mangli. Jumlah keseluruhan aparatur / perangkat desa di kecamatan Pujer sebesar 162 aparatur / perangkat desa. Responden dalam penelitian telah ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* yang mana dalam pengambilan sampel terdapat kriteria tertentu. Kriteria pertama dalam pengambilan sampel desa ditetapkan bahwa setiap desa di kecamatan pujer memperoleh anggaran pagu ADD lebih dari Rp. 490.182.462,635 sehingga diperoleh lima desa yang masuk ke dalam kriteria. Kelima desa tersebut yaitu desa Mengok, Sukowono, Sukokerto, Maskuning Wetan dan Kejayan. Sedangkan keenam desa lainnya yaitu Desa Randucangkring, Desa Alas Sumur, Desa Sukodono, Desa Padasan, Desa Mangli, dan Desa Maskuning Kulon tidak masuk kedalam kriteria pemilihan sampel desa. Kriteria kedua pengambilan sampel aparatur desa di setiap desa berdasarkan lama jabatan yaitu menjabat sebagai perangkat desa lebih dari satu tahun serta jabatannya sebagai aparatur desa berdasarkan Undang – undang Dana Desa yaitu Kades, Sekdes, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Berdasarkan survey, kuesioner yang disebar sebanyak 75 kuesioner yang disebar di lima desa yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Semua desa yang dijadikan sampel memberikan ijin dalam penelitian ini. Data diolah menggunakan *SPSS (Statistical Package for Social Science)* versi 24. Data jumlah populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :



**Tabel 4.1** Rekapitulasi Jumlah Populasi

No	Nama Desa	Jumlah pegawai
1	Desa Mengok	20
2	Desa Sukowono	15
3	Desa Sukokerto	15
4	Desa Kejayan	14
5	Desa Maskuning Wetan	14
6	Desa Maskuning Kulon	14
7	Desa Alas Sumur	14
8	Desa Padasan	14
9	Desa Mangli	14
10	Desa Sukodono	14
11	Desa Randucangkring	14
<b>Jumlah Populasi aparatur desa di kecamatan Pujer</b>		<b>162</b>
<b>Desa yang tidak masuk kedalam kriteria sampel desa:</b>		
1.	Desa Randucangkring	14
2.	Desa Alas Sumur	14
3.	Desa Sukodono	14
4.	Desa Maskuning Kulon	14
5.	Desa Padasan	14
6.	Desa Mangli	14
Jumlah		<b>84</b>
<b>1. Desa yang masuk kedalam kriteria sampel desa :</b>		
	Desa Mengok	20
	Desa Sukowono	15
	Desa Sukokerto	15
	Desa Maskuning Wetan	14
	Desa Kejayan	14
Jumlah		<b>78</b>
<b>2.</b>	<b>Aparatur desa yang tidak termasuk kriteria</b>	<b>3</b>
Total sampel		<b>75</b>

Dari jumlah populasi yang ada, terdapat 3 sampel dalam penelitian ini tidak memenuhi kriteria karena mereka menjabat sebagai perangkat desa belum genap satu tahun. Hasil pengumpulan data kuesioner yang berhasil kembali dan memenuhi syarat untuk dapat diolah adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2** Hasil Pengumpulan Data

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Kuesioner yang disebar	75	100%
Kuesioner yang tidak digunakan	10	13.33%
Kuesioner yang digunakan	65	86.67%

Sumber : Data yang diolah 2017

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa kuesioner yang disebar pada responden sebanyak 75 kuesioner (100%). Dari 75 kuesioner yang disebar, kuesioner yang dapat digunakan adalah sebanyak 65 kuesioner (86.67%). Hal ini dikarenakan terdapat kuesioner yang tidak diisi oleh perangkat desa karena kesibukan perangkat desa.

#### 4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian ini menampilkan tabel yang menunjukkan jumlah kisaran jawaban, jawaban terendah setiap variabel, jawaban tertinggi setiap variabel, dan rata – rata jawaban dari setiap variabel yang dihasilkan dari pengisian kuesioner oleh responden. Deskripsi variabel penelitian akan disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan angka minimum(min), maksimum (max), rata – rata (mean) dan standar deviasi yang diperoleh dari jawaban responden yang diterima sebagai berikut

**Tabel 4.3** Analisa Statistik Deskriptif masing – masing variabel

#### Deskriptive Statistics

	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviasi</b>
Moralitas Aparatur	65	7	28	17,46	5,545
Pengendalian Internal	65	24	40	32,32	3,113
Motivasi	65	15	25	20,05	2,689
Penegakan Hukum	65	15	25	21,37	2,440
Fraud	65	9	29	17,45	5,315
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Data yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan yang dijabarkan dalam tabel 4.3 dapat diketahui jumlah data pada setiap variabel sebanyak 65 sampel responden aparatur desa. Masing – masing variabel akan dijabarkan sebagai berikut :

#### **4.1.2.1 Deskripsi Variabel moralitas**

Pada penelitian ini moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral. Moralitas merupakan cerminan sikap dan sifat seseorang dalam melakukan tindakan. Moralitas ini diukur dengan indikator yang dijabarkan ke dalam 6 pertanyaan.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi sebesar 5,545 lebih kecil dari mean sebesar 17,46. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Selain itu semakin rendah standar deviasi maka semakin rendah penyimpangan data dari rata – rata hitungannya. Nilai minimalnya sebesar 7 dan nilai maksimalnya sebesar 28. Nilai sampel dominan berkumpul sekitar rata – rata hitungannya sebesar 17,46. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan tabel 3.2 sehingga dapat disimpulkan bahwa moralitas aparatur di sektor pemerintahan desa dalam kategori cukup bermoral.

#### **4.1.2.2 Deskripsi Variabel Pengendalian Internal**

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang mempengaruhi manusia dan sistem teknologi informasi yang disusun untuk mencapai tujuan perusahaan/ organisasi. Pengendalian Internal ini diukur dengan indikator yang dijabarkan ke dalam 8 pertanyaan

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai mean sebesar 32,32 dan nilai standar deviasi sebesar 3,113. Artinya, nilai mean lebih besar dari standar deviasi

hal ini menandakan bahwa sebaran data yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Selain itu semakin rendah standar deviasi maka semakin rendah penyimpangan data dari rata – rata hitungnya. Nilai minimumnya sebesar 24 dan nilai maksimalnya sebesar 40. Nilai sampel dominan berkumpul sekitar rata – rata hitungnya sebesar 32,32. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan tabel 3.3 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal di sektor pemerintahan desa dalam kategori efektif.

#### **4.1.2.3 Deskripsi Variabel Motivasi**

Motivasi merupakan keinginan untuk bertindak yang disebabkan oleh dorongan dari dalam diri seseorang , hanya orang tersebutlah yang mampu mengontrol dirinya. Motivasi ini diukur dengan indikator yang dijabarkan ke dalam 5 pertanyaan.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai mean sebesar 20,05 dan nilai standar deviasi sebesar 2,689. Artinya bahwa nilai mean lebih besar daripada standar deviasi, itu mengindikasikan bahwa hasil sebaran data yang cukup baik. Hal ini dikarenakan standar deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Selain itu semakin rendah standar deviasi maka semakin rendah penyimpangan data dari rata – rata hitungnya. Nilai sampel dominan berkumpul sekitar rata – rata hitungnya sebesar 20,05. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan tabel 3.4 sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi di sektor pemerintahan desa dalam kategori termotivasi.

#### 4.1.2.4 Deskripsi Variabel Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan penegakan ide – ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Penegakan Hukum ini diukur dengan indikator yang dijabarkan ke dalam 5 pertanyaan.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai mean sebesar 21,37 dan nilai standar deviasi sebesar 2,44. Berdasarkan hasil diatas, mean lebih besar dari standar deviasi,hal ini menunjukkan bahwa hasil sebaran data yang cukup baik. Dikarenakan standar deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Selain itu semakin rendah standar deviasi maka semakin rendah penyimpangan data dari rata – rata hitungunya. Nilai minimalnya sebesar 15 dan nilai maksimalnya sebesar 25. Nilai sampel dominan berkumpul sekitar rata – rata hitungunya sebesar 21,37. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan tabel 3.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di sektor pemerintahan desa dalam kategori sangat tegak.

#### 4.1.2.5 Deskripsi Variabel Kecurangan (*Fraud*) di sektor pemerintah desa

Pada penelitian ini, variabel *fraud* merupakan persepsi pegawai mengenai tindak kecurangan yang terjadi di sektor pemerintah desa. Kecurangan (*fraud*) ini diukur dengan indikator yang dijabarkan ke dalam 9 pertanyaan.

Berdasarkan tabel 4.3dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi sebesar 5,315 dan mean sebesar 17,45. Artinya, nilai mean lebih besar dari standar deviasi. Ini menunjukkan bahwa hasil sebaran data yang cukup baik. Dikarenakan standar deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Selain itu semakin rendah standar deviasi maka semakin rendah penyimpangan data dari rata – rata hitungunya. Nilai minimalnya sebesar 9 dan nilai maksimalnya sebesar 29. Nilai sampel dominan berkumpul sekitar rata – rata hitungunya sebesar 17,45. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan

tabel 3.6 sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan kecurangan di sektor pemerintahan desa dalam kategori jarang terjadi.

## 4.2 Analisis Uji Kualitas Data

### 4.2.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan korelasi bivariate antara masing – masing skor indikator dengan total skor konstruk. Konstruk dikatakan valid jika nilai *Pearson Correlation* >0,5 dan signifikansi <0,05 (Ghozali,2016:52 dalam Afsari 2016). Di bawah ini adalah ringkasan tabel yang menggambarkan hasil uji validitas.

**Tabel 4.4** Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Item	Koefisien		Keterangan
		Korelasi	Signifikansi	
GREED (MORALITAS APARATUR)	X1.1	0,862	0,000	Valid
	X1.2	0,781	0,000	Valid
	X1.3	0,826	0,000	Valid
	X1.4	0,787	0,000	Valid
	X1.5	0,510	0,000	Valid
OPPORTUNITY (PENGENDALIAN INTERNAL)	X2.1	0,636	0,000	Valid
	X2.3	0,650	0,000	Valid
	X2.4	0,660	0,000	Valid
	X2.5	0,660	0,000	Valid
	X2.6	0,716	0,000	Valid
	X2.7	0,533	0,000	Valid
NEED (MOTIVASI)	X2.8	0,606	0,000	Valid
	X3.1	0,617	0,000	Valid
	X3.2	0,707	0,000	Valid
	X3.3	0,655	0,000	Valid
	X3.4	0,693	0,000	Valid
EKSPASURE (PENEGAKAN HUKUM)	X3.5	0,703	0,000	Valid
	X4.1	0,814	0,000	Valid
	X4.2	0,685	0,000	Valid
	X4.3	0,854	0,000	Valid

	X4.4	0,774	0,000	Valid
	X4.5	0,799	0,000	Valid
FRAUD	Y1	0,835	0,000	Valid
	Y2	0,779	0,000	Valid
	Y3	0,741	0,000	Valid
	Y4	0,666	0,000	Valid
	Y5	0,736	0,000	Valid
	Y6	0,626	0,000	Valid
	Y7	0,693	0,000	Valid
	Y8	0,638	0,000	Valid
	Y9	0,636	0,000	Valid

Sumber : Data yang diolah, 2017

Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa terdapat pertanyaan dalam kuesioner yang belum memenuhi uji validitas yaitu X1.6 dan X2.2 karena nilai *Pearson Correlation* 0,383 dan 0,422 serta nilai signifikansi 0,002 dan 0,000. Namun untuk pertanyaan yang lain dalam kuesioner telah memenuhi uji validitas karena nilai *Pearson Correlation* >0,5 dan nilai signifikansi <0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat dua instrumen pertanyaan dalam dua variabel yang dinyatakan tidak valid dan pertanyaan yang lain dinyatakan valid.

#### 4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini adalah *Cronbach Alpha* (Ghozali,2016:52 dalam Afsari 2016). Kriteria pengujian adalah jika koefisien alpha ( $\alpha$ ) > 0,6 maka instrumen yang digunakan dikatakan reliabel. Pengujian reliabilitas data untuk masing – masing variabel ditunjukkan pada tabel 4.14 berikut ini :

**Tabel 4.5** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Moralitas	0,841	Reliabilitas
Pengendalian Internal	0,765	Reliabilitas
Motivasi	0,686	Reliabilitas
Penegakan Hukum	0,844	Reliabilitas

Kecenderungan Kecurangan	0,873	Reliabilitas
--------------------------	-------	--------------

Sumber : Data yang diolah, 2017

Dari hasil uji reliabilitas pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel adalah  $>0,6$ . Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel untuk dilakukan analisis regresi.

### 4.3 Analisis Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Hasil Uji Normalitas Data

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika residual yang disebabkan oleh model regresi berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila *error* model regresi tidak terdistribusi normal, maka uji statistika yang dilakukan dalam penelitian akan menjadi tidak valid.

**Tabel 4 6 Rekapitulasi Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov***

Variabel	Nilai <i>Kolmogorov</i> <i>-Smirnov</i>	Keterangan
Moralitas (X1), Pengendalian Internal (X2), Motivasi (X3), Penegakan Hukum (X4), Kecurangan (Y)	0,192	Berdistribusi Normal

Sumber : Data yang diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig* sebesar  $0,192 > 0,05$ . Sehingga dapat diartikan bahwa *error* data terdistribusi normal.



### 4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* (Ghozali,2016:52 dalam Afsari 2016). Dasar pengambilan keputusan jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF <10 maka data dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas dari masing – masing variabel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.7** Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Moralitas	0,949	1,054	Non-Multikolinearitas
Penegakan Hukum	0,487	2,052	Non-Multikolinearitas
Motivasi	0,674	1,484	Non-Multikolinearitas
Penegakan Hukum	0,462	2,166	Non-Multikolinearitas

Sumber: Data yang diolah, 2017

### 4.3.3 Hasil Uji Heterodaktisitas

Hasil uji heterokedastisitas dilakukan menggunakan *Scatterplot* (Lailiyah,2016) dimana hasil uji menunjukkan bahwa data tersebar dibawah dan diatas angka nol pada sumbu Y. Titik – titik tersebut menyebar dan tidak membentuk pola sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat disimpulkan bahwa data yang ada adalah homoskedastisitas.

Berdasarkan hasil ketiga asumsi klasik yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini model regresi telah memenuhi asumsi klasik sehingga dapat dilakukan uji selanjutnya.

#### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh moralitas, pengendalian internal, motivasi dan penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

**Tabel 4.8** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	Keterangan
Konstanta	26,645	-	-
Moralitas ( $X_1$ )	,340	,008	Signifikan
Pengendalian Internal ( $X_2$ )	-,696	,026	Signifikan
Motivasi ( $X_3$ )	,090	,749	Tidak Signifikan
Penegakan Peraturan ( $X_4$ )	,174	,643	Tidak Signifikan

Sumber: Data yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 26,645 + 0,340X_1 - 0,696X_2 + 0,090X_3 + 0,174X_4 + 6,556$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat digambarkan sebagai berikut :

- Konstanta ( $\alpha$ ) dalam persamaan tersebut sebesar 26,645 artinya *fraud* di instansi pemerintah akan selalu terjadi meskipun variabel bebas bernilai nol atau tidak ada.
- Nilai koefisien regresi variabel moralitas aparatur sebesar 0,340 artinya kenaikan moralitas akan meningkatkan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah desa.
- Nilai koefisien regresi variabel pengendalian internal sebesar -0,696. Artinya, kenaikan pengendalian internal akan menurunkan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah desa.

- d. Nilai koefisien regresi variabel motivasi sebesar 0,090 artinya kenaikan variabel motivasi akan meningkatkan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah desa.
- e. Nilai koefisien regresi variabel penegakan hukum sebesar 0,174 artinya setiap kenaikan variabel penegakan hukum akan meningkatkan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah desa.
- f. Nilai *Standart Error* (*e*) didapatkan sebesar 6,556

#### 4.4.1 Uji f (Model)

Hasil uji model pada penelitian dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

**Tabel 4.9** Hasil Uji Model

Variabel	Sig	F
Residual	,015	3,357

Sumber: Data yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikansi  $0,015 < 0,05$ , F tabel sebesar 2,53 dan F hitung sebesar 3,357. Jadi, apabila F hitung  $> F$  tabel dan signifikansi  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan output diatas, diketahui F hitung  $3,236 > F$  tabel 2,53 dan nilai signifikansi  $0,015 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu moralitas aparatur, pengendalian internal, motivasi dan penegakan hukum berpengaruh signifikan secara simultan terhadap fraud. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix.

#### 4.4.2 Uji t

Hasil uji t pada penelitian ini, dapat diketahui pada tabel 4.10 sebagai berikut :

**Tabel 4.10** Hasil Uji t

Model	T	Sig	Keterangan
(Constan)	4,064	,000	
Moralitas (X <sub>1</sub> )	2,765	,008	H <sub>1</sub> ditolak
Pengendalian Internal (X <sub>2</sub> )	-2,281	,026	H <sub>2</sub> diterima
Motivasi (X <sub>3</sub> )	,321	,749	H <sub>3</sub> ditolak
Penegakan Hukum (X <sub>4</sub> )	,465	,643	H <sub>4</sub> ditolak

Sumber: Data yang diolah, 2017

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui hasilnya sebagai berikut :

1. Variabel moralitas aparatur mempunyai nilai  $t_{hitung} 2,765 > t_{tabel} 1,671$  dengan nilai signifikan sebesar 0,008 dan memiliki nilai koefisien regresi positif 0,340. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moralitas aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa. Dengan demikian H<sub>1</sub> ditolak artinya moralitas tidak berpengaruh negatif terhadap *fraud*.
2. Variabel pengendalian internal mempunyai nilai  $t_{hitung} 2,281 > t_{tabel} 1,671$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 dan memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar 0,696. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa. Dengan demikian H<sub>2</sub> diterima artinya terdapat pengaruh negatif antara pengendalian internal terhadap *fraud*.
3. Variabel motivasi mempunyai nilai  $t_{hitung} 0,321 < t_{tabel} 1,671$  dengan nilai signifikansi 0,749 dan memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,090. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa. Dengan demikian H<sub>3</sub> ditolak artinya motivasi tidak berpengaruh positif terhadap *fraud*.

4. Variabel penegakan hukum mempunyai nilai  $t_{hitung} 0,465 < t_{tabel} 1,671$  dengan nilai signifikansi 0,643 dan memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,174. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penegakan hukum tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa. Dengan demikian  $H_4$  ditolak, artinya penegakan hukum tidak berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

#### 4.4.3 Koefisien Determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut :

**Tabel 4.11** Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
,428 <sup>a</sup>	,183	,128

Sumber: Data yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui hasil *Adjusted R square* sebesar 0,128 atau 12,8%. Hal ini menunjukkan bahwa 12,8% variabel kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa dipengaruhi oleh variabel moralitas, pengendalian internal, motivasi, penegakan hukum dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 Pengaruh Moralitas Aparatur Terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hipotesis pertama yang dirumuskan oleh peneliti adalah moralitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Sehingga semakin tinggi level moralitas maka akan semakin rendah terjadinya kecurangan. Hasil pengolahan data menunjukkan moralitas aparatur berpengaruh positif terhadap kecurangan di sektor pemerintah desa jadi  $H_1$  ditolak.

Dapat ditunjukkan pada tabel 4.10 bahwa nilai signifikansi variabel moralitas sebesar  $0,008 < 0,05$  dan  $t_{hitung} 2,765 > t_{tabel} 1,671$ . Hubungan yang ditunjukkan adalah positif, artinya semakin meningkatnya moralitas maka fraud akan semakin naik. Hal tersebut dipengaruhi adanya tekanan yang berasal dari dalam individu maupun tekanan dari luar individu yaitu tekanan dari lingkungan kerja. Adanya tekanan yang terus menerus hal ini memberikan dorongan kepada individu untuk melakukan kecurangan meskipun sebenarnya individu itu mengetahui mana yang benar dan salah. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian Wilopo dan Noviriantini bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

#### **4.5.2 Pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan**

Hipotesis kedua yang dirumuskan oleh peneliti yaitu pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Semakin efektif pengendalian internal dalam organisasi tersebut maka akan semakin rendah kecurangan itu terjadi. Hasil pengolahan data menunjukkan pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan di sektor pemerintah desa maka  $H_2$  diterima.

Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 4.10 bahwa nilai signifikansi variabel pengendalian internal sebesar  $0,017 < 0,05$  dan  $t_{hitung} 2,457 > t_{tabel} 1,671$ . Hubungan yang ditunjukkan adalah negatif, artinya meningkatnya keefektifan dan kepatuhan pengendalian internal maka terjadinya fraud akan menurun. Ini menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki pengendalian internal yang baik yaitu dengan adanya pembagian tugas dan wewenang, penilaian terhadap risiko yang baik, aktivitas dan pengendalian yang efektif berupa peraturan dan kebijakan yang berlaku, informasi dan komunikasi yang baik serta pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional instansi.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

#### 4.5.3 Pengaruh motivasi terhadap kecenderungan kecurangan

Hipotesis ketiga yang dirumuskan oleh peneliti yaitu motivasi kebutuhan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa motivasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan di sektor pemerintah desa maka  $H_3$  ditolak.

Dapat ditunjukkan pada tabel 4.10 bahwa nilai signifikansi variabel motivasi sebesar 0,662 lebih besar dari 0,05 dan  $t_{hitung} 0,439 < t_{tabel} 1,671$ . Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel motivasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan di sektor pemerintah desa. Ini dikarenakan bahwa motivasi negatif aparatur desa dalam pemenuhan kebutuhan tidak menjadikan salah satu faktor seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan.

Hal ini terjadi karena dalam pemenuhan kebutuhannya, aparatur desa sudah memperoleh bagian tanah yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan. Dilihat dari letak geografis, desa di kecamatan Pujer terletak didaerah pegunungan sehingga mereka tidak kebingungan dalam pemenuhan kebutuhan karena disana lahannya masih luas serta gaya hidup di desa cenderung sederhana daripada gaya hidup aparatur desa yang tinggal di kota. Sehingga dorongan atau motivasi karyawan dalam pemenuhan kebutuhannya tidak mendorong individu tersebut melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan yang dilakukan oleh Pria Adi bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

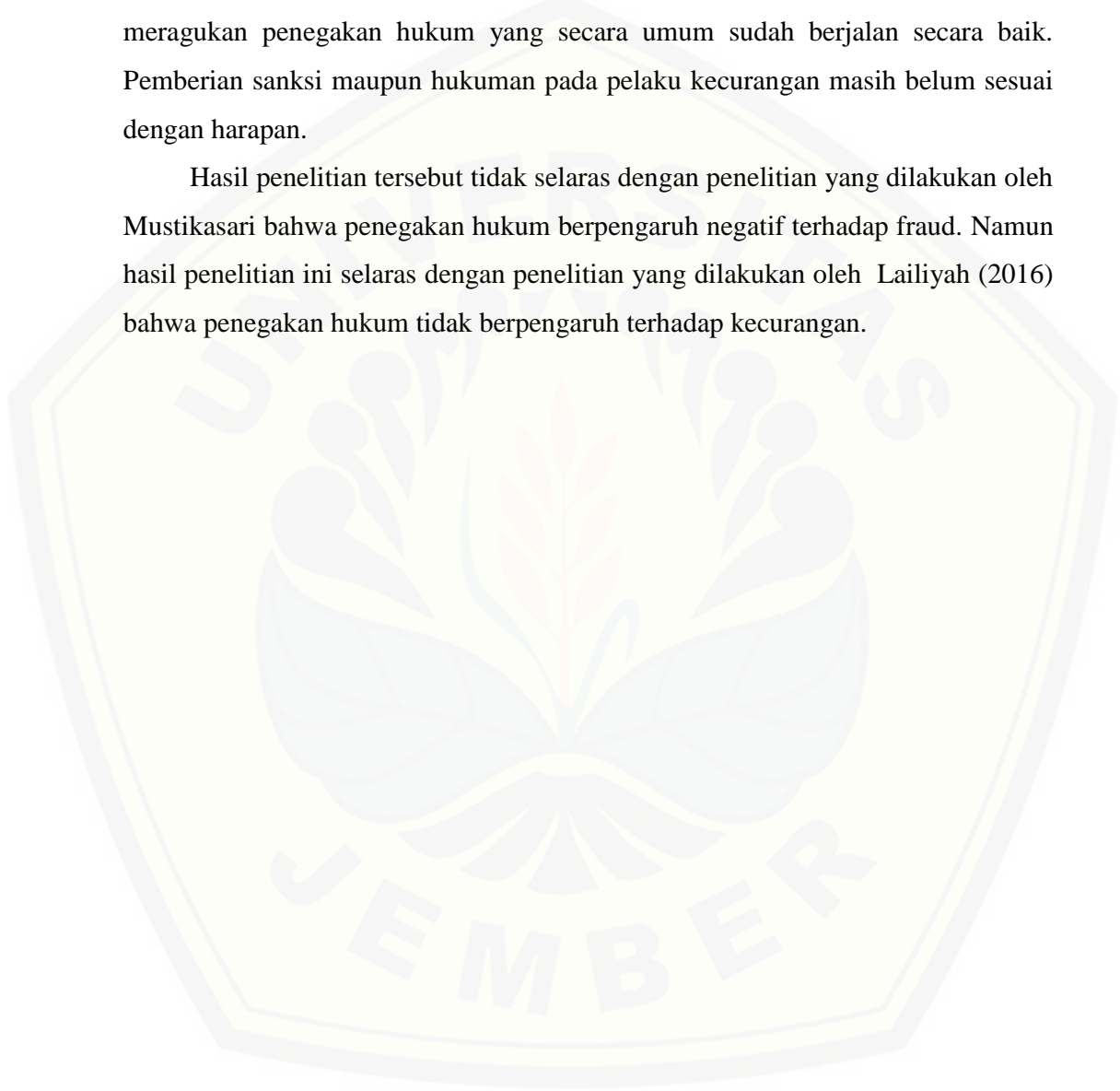
#### 4.5.4 Pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan

Hipotesis keempat yang dirumuskan oleh peneliti yaitu penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Semakin tinggi penegakan hukum maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan terjadi. Hasil pengolahan data menunjukkan penegakan hukum tidak berpengaruh negatif terhadap kecurangan di sektor pemerintah desa maka  $H_4$  ditolak.

Ini dapat ditunjukkan pada tabel 4.10 bahwa nilai signifikansi variabel penegakan hukum sebesar 0,731 > 0,05 dan  $t_{hitung} 0,345 < t_{tabel} 1,671$ . Sehingga

dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan di sektor pemerintah desa. Hal tersebut tidak mendukung teori yang ada bahwa semakin baik penegakan hukum maka semakin menurun kecurangan itu terjadi. Ini disebabkan oleh persepsi aparaturnya desa yang masih meragukan penegakan hukum yang secara umum sudah berjalan secara baik. Pemberian sanksi maupun hukuman pada pelaku kecurangan masih belum sesuai dengan harapan.

Hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap fraud. Namun hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah (2016) bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap kecurangan.





## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel – variabel yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada aparatur desa dengan mengumpulkan persepsi pegawai aparatur desa di lingkungan kecamatan Pujer Bondowoso. Variabel – variabel yang diujikan yaitu moralitas, pengendalian internal, motivasi dan penegakan hukum

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel moralitas tidak berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah desa. Hal tersebut dipengaruhi adanya tekanan yang berasal dari dalam individu maupun tekanan dari luar individu yaitu tekanan dari lingkungan kerja.
2. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah desa. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya keefektifan pengendalian internal akan menurunkan terjadinya *fraud* atau kecurangan pada aparatur pemerintah desa
3. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel motivasi tidak berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah desa. Hal ini dikarenakan dalam motivasi pemenuhan kebutuhan aparatur desa sudah mendapat bagian tanah serta letak desanya masih berada di daerah pegunungan sehingga aparatur desa tidak kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan.
4. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel penegakan hukum tidak berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah desa. Hal ini disebabkan oleh persepsi aparatur desa

yang masih meragukan penegakan hukum yang secara umum sudah berjalan secara baik.

## 5.2 Keterbatasan Peneliti

Dalam melakukan penelitian ini, diperoleh keterbatasan penelitian ini yaitu

1. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan kuesioner yang membutuhkan jawaban jujur responden dan apabila kemungkinan responden tidak menjawab dengan jujur dikarenakan kesibukan responden maka hal itu diluar kendali peneliti.
2. Penelitian ini hanya meneliti variabel moralitas, pengendalian internal, motivasi dan penegakan hukum yang merupakan proksi dari teori GONE yaitu *greed, opportunity, need* dan *eksposure*.

## 5.3 Saran

Saran peneliti untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengambil obyek penelitian di sektor pemerintah desa yaitu :

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di sektor pemerintah desa menggunakan metode observasi sehingga dapat memperdalam study kasus dan hasil pengukuran lebih mendalam.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih bervariasi dan penelitian selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian selain di Bondowoso.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade,Afri. 2017. Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Moralitas dan Motivasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi ( Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar). Artikel. Padang: Universitas Negeri Padang
- Adinda, Yanita Maya. 2015. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintah Kabupaten Klaten.*Skripsi*.Jawa Tengah: Universitas Negeri Semarang
- Afsari, Siti Fitriani.2016. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintah Berdasarkan Teori *Fraud Triangle*: Persepsi Pegawai Pemerintah (Studi pada SKPD di Kabupaten Jember). *Skripsi*. Jember:Universitas Negeri Jember
- Aliyudin, Rizal Sukma. 2015. Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Tesis*. Bandung: Pasca Sarjana Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unniversitas Widyatama
- Aranta, Petra Zulia.2013. Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto).*Skripsi*.Padang:Universitas Negeri Padang
- Ardiana, Wenny.2016. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Publikasi Ilmiah.Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ariani, Ketut Sulasmi., Lucy Sri Musmini,dan Nyoman Trisna Herawati. 2014. Analisis Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi Dan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di Pdam Kabupaten Bangli. *e- Journal s1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 2 No: 1 Tahun 2014
- Badan Pusat Statistitika. 2016. *Kecamatan Pujer Dalam Angka*. Bondowoso: BPS Bondowoso
- BPKP.2008. *Fraud Auditing*.Sd-P2e/Pmd-13-01.5(revisi 2009).Jakarta: Pusdiklatwas BPKP
- Campus, Syahdan. 2015. Jenis – Jenis Fraud.Binus Universitas. <http://accounting.binus.ac.id>. [Diakses pada bulan September 2017]

- Dewi, Kadek Yuli Kurnia, dan Ni Made Dwi Ratnadi. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18.2. Februari (2017): 917-941
- Fitriani, Annisa., dan Zaki Baridwan. Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi: Dimensi *Fraud Triangle*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariete IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Herman, Lisa Amelia. 2013. Pengaruh Keadilan Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah di Kota Padang). Artikel. Padang: Universitas Negeri Padang
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2001. *Standar Pemeriksaan Akuntan Publik*. SA Seksi 316. Pertimbangan Atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan
- Ismatullah, Ismet., dan Elan Eriswanto. 2016. Analisa Pengaruh Teori Gone Fraud Academic Fraud Di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jawa Barat: Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi
- Karyono. 2002. Fraud auditing. *Journal The WinnERS*. Vol 3 (2): 151-153.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Kebijakan Pengalokasian dan penyaluran Danan Desa Tahun 2017
- Kite, D., Timothy J. Louwers and Robin R. Radtke, 1996. Ethics and Environmental Auditing: An Investigation of Environmental Auditors' Levels of Moral Reasoning. *Behavioral Research in Accounting*, vol. 8 Supplement
- Kurniawan, Gusnadi. 2013. Pengaruh Moralitas, Motivasi dan sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan ( Studi Empiris pada SKPD di Kota Solok). Skripsi. Padang: FE Universitas Negeri Padang
- Lailiyah, Afidatul. 2016. Variabel – Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintah : Persepsi Pegawai Bidang Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Skripsi. Jember: Universitas Negeri Jember
- Maula, Kholida Atiyatul. 2017. Analisis Pengaruh Faktor – Faktor Pendorong Tindak Kecurangan terhadap Kecenderungan Aparatur Pemerintah

- Melakukan Fraud (Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Banyumas).Vol. 2 No. 01 2017
- Mustikasari, Dhermawati Putri. 2013. Persepsi pegawai dinas ke kabupaten Batang tentang faktor – aktor yang mempengaruhi fraud.*Skripsi*.Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Prasetyo, Boy Sulfianto Eko. 2013. Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi; Studi Pada PT. Telkom dan PDAM di Pati. *Skripsi*: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Pratama, Reza Yuka Satria.2017. Analisis Dimensi *Fraud Diamond* Dan *Gone Theory* Terhadap *Academic Fraud* ( Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta).*Skripsi*.Surakarta: Univeristas Muhammadiyah Surakarta
- Priantara, Diaz.2013.*Fraud Auditing & Investigation*.Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ramdhana, Senna Afriaska.2015. Persepsi Pegawai Mengenai Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*) studi pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupetan Kebumen.*Skripsi*.Semarang : Universitas Negeri Semarang
- Reza, Regina Aditya.2010. Pengaruh Daya Kepemimpinan Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Sinar Santosa Perkasa Banjarnegara.*Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Robbins, Stephen P., dan Timothy A. Judge. 2013. *Perilaku Organisasi*. 16 ed. Jakarta: Salemba Empat
- Samsul. Teori Motivasi. <http://web.unair.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2017
- Saputra, Gede Krisna., Nyoman Ari Surya Dharmawan., I Gusti Ayu Purnamawati. 2015. Pengaruh Pengendalian Intern Kas, Implementasi *Good Governance* dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan (*Fraud*) (Studi Empiris pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur). *E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Volumen: 3 No. 1 Thaun 2015

- Sari, Deviana. 2016. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Pada Sektor Pemerintah Kota Bandar Lampung: Persepsi Pegawai Pemerintah. *Tesis*. Lampung: Universitas Lampung
- Setiawan, Mia Angelina., dan Nayang Helmayunita. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, Tekanan Finansial, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintah Daerah. e-ISSN:2549-9807 p-ISSN:1412-3290
- Siena, Ibnu. 2017. Temuan ICW, Wilayah Jatim Paling Banyak Terjadi Korupsi Selama 2016. <https://www.merdeka.com> (diakses pada tanggal 2 Oktober 2017)
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2010. Peran BPKP dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah. Jakarta
- Udayani, Anak Agung K. Finty, dan Maria M. Ratna Sari. 2017. Pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu pada kecenderungan kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol18.3. Maret: 1778
- Wardana, I Gede Adi Kusuma., Edy Sujana., Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* dan Moralitas Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol:8 No: 2 Tahun 2007
- Wilopo. 2006. *Analisis Faktor – faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan BUMN di Indonesia*. Simposium IX Padang
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. 1<sup>st</sup>. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP
- Zaini, Mohammad., Anita Carolina., dan Achdiar Redy Setiawan. Analisis Pengaruh *Fraud Diamond* dan *Gone Theory* Terhadap *Academic Fraud* (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Se-Madura). *Skripsi*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura
- Zimbelman, Mark F., Conan C. Albrecht., W. Steve Albrecht. dan Chad O. Albrecht. 2014. *Akuntansi Forensik*. 4. Jakarta: Salemba Empat
- Zulkarnain, Rifqi Mirza. 2013. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintah (Studi Pada Dinas Se-Kota Surakarta). *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang

\_\_\_\_\_. 2017. Kasus Dugaan Korupsi Proyek Revitalisasi Pasar, Polisi Tahan Kades Wringin. <http://www.pojokkiri.net> (diakses pada 23 Oktober 2017)



**Lampiran 1 KUESIONER PENELITIAN**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Pegawai Instansi Pemerintah Desa Kecamatan Pujer Bondowoso  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Chusnul Khotimah  
NIM : 140810301008  
Prodi : S1 Akuntansi  
Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian berikut, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Univeritas Jember dengan judul “ **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Aparatur Pemerintah Desa Di Kecamatan Pujer Bondowoso**”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Oleh karena itu, dimohon kesediaannya untuk mengisi/menjawab kuesioner ini dengan sejujur – jujur nya. **Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi tidak untuk dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.**

Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

*Contact Person : 08563591780*

Hormat Saya,

Chusnul Khotimah



**IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama : (boleh tidak diisi)
  2. Umur :
  3. Jabatan :
  4. Jenis Kelamin : ( Laki-laki / Perempuan \*)
  5. Lama Jabatan :
  6. Pendidikan Terakhir :
- \*) coret yang tidak perlu

**Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Berikut ini merupakan pernyataan – pernyataan yang mewakili pendapat – pendapat umum mengenai kondisi di dalam instansi saudara. Tidak ada pernyataan benar atau salah. Saudara mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan – pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Saudara setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan memberi tanda *checklist* (√) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut :

**Penilaian :**

- STS : Sangat Tidak Setuju  
TS : Tidak Setuju  
N : Netral  
S : Setuju  
SS : Sangat Setuju

**1. Moralitas Aparatur Pemerintah Desa (digunakan untuk menentukan Greedy)**

**Untuk jawaban nomor 1 sampai dengan 6 dihalaman berikut Bapak / Ibu diberikan kasus yang tidak terjadi sebenarnya. Berikan jawaban yang menurut Bapak / Ibu paling sukai.**

Usman Isnaini, Ak adalah seorang aparatur desa di Desa X. Dia merupakan pegawai baru aparat desa dan ditempatkan sebagai staf akuntansi. Selama tiga bulan bekerja di desa X, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belum memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Masih terdapat beberapa program yang tidak jalan, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi batas anggaran tapi program pembangunan belum sepenuhnya berjalan.

Mengetahui hal ini Usman Isnaini, Ak menyampaikan permasalahan tersebut kepada pimpinannya. Namun pimpinannya meminta kepada Usman Isnaini, Ak untuk tidak mengubah proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang telah berjalan. Usman Isnaini, Ak diminta untuk menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran tersebut dengan tetap menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran telah digunakan dengan sebaiknya dan pembangunan – pembangunan telah dilakukan dengan semestinya. Pimpinan juga menyatakan akan memberikan bonus pada Usman Isnaini, Ak.

Usman Isnaini, Ak menyarankan agar pimpinannya mempertimbangkan untuk menunjukkan gambaran kegiatan pembangunan yang telah tercapai, dan agar tidak terkena sanksi Undang – Undang, termasuk agar mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat, serta tidak merugikan para pegawai lainnya.

**Nilailah keputusan pimpinan tempat Bapak/Ibu bekerja bila kondisi yang dihadapi oleh Usman Isnaini, Ak terjadi pada di desa tempat Bapak/Ibu bekerja.**

Mohon Bapak/Ibu memberi tanda *check list* (√) pada salah satu jawaban sesuai dengan keadaan ditempat Bapak/ Ibu bekerja

Pilihan jawaban: STS =Sangat Tidak setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pimpinan Desa tetap menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu untuk kepentingannya					
2.	Pimpinan Desa memberikan bonus pada staf akuntansinya karena telah patuh					
3.	Pimpinan Desa tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu agar kinerjanya bagus dan terlihat baik					
4.	Pimpinan Desa Menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu, karena sudah menjadi kelaziman di pemerintahannya					
5.	Pimpinan Desa Menyusun Laporan Realisasi Anggaran tidak seperti yang sebenarnya, karena pimpinan tidak takut terkena sanksi Undang – Undang					
6.	Pimpinan Desa menyusun Laporan Realisasi Anggaran tidak seperti kondisi yang sebenarnya dengan tidak mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat serta merugikan pemerintah.					

## 2. Pengendalian Internal (digunakan untuk menentukan Opportunity)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Di instansi tempat saya bekerja, sudah ada pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas.					
2.	Di instansi tempat saya bekerja, terdapat penilaian terhadap risiko					
3.	Di instansi tempat saya bekerja, terdapat upaya untuk mengidentifikasi, menaksir, menganalisis dan mengendalikan risiko internal maupun eksternal					
4.	Di instansi tempat saya bekerja, pemisahan kewajiban telah diterapkan					

	secara memadai					
5.	Di instansi tempat saya bekerja, sistem informasi telah berfungsi dengan baik					
6.	Di instansi tempat saya bekerja, seluruh informasi kegiatan operasional instansi harus dicatat dalam sistem akuntansi					
7.	Di instansi tempat saya bekerja, diterapkan peraturan untuk dilakukannya pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal					
8.	Di instansi tempat saya bekerja, pemantauan dilakukan secara periodik					

**3. Motivasi (Digunakan untuk menentukan Need)**

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mendapatkan kebutuhan yang layak					
2.	Saya merasa aman dalam melakukan pekerjaan.					
3.	Saya memiliki hubungan yang erat dengan semua karyawan.					
4.	Saya sering dan ingin selalu mendapat penghargaan atas pekerjaan yang saya lakukan.					
5.	Saya suka melaksanakan tugas yang menantang.					

**4. Penegakan Hukum (digunakan untuk menentukan Exposure)**

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Di instansi tempat saya bekerja, ada aturan – aturan hukum yang berlaku					
2.	Di instansi tempat saya bekerja, saya merasa para pejabat tanggap dalam penanganan pelanggaran peraturan					
3.	Di instansi tempat saya bekerja, kegiatan operasional instansi dilaksanakan sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi dan pemerintah					
4.	Di instansi tempat saya bekerja, semua pegawai datang dan pulang tepat waktu					
5.	Di instansi tempat saya bekerja, semua					

	pegawai menjalankan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawabnya masing – masing					
--	--	--	--	--	--	--

**5. Kecenderungan *Fraud* di Sektor Pemerintah**

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila untuk suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya					
2	Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak berwenang					
3	Suatu hal yang wajar bagi instansi saya, apabila untuk tujuan tertentu harga beli peralatan / perlengkapan kantor dicatat lebih tinggi					
4	Merupakan sesuatu yang wajar di instansi saya apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai ke dalam belanja peralatan gedung kantor					
5	Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya, para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor					
6	Bukan suatu masalah bagi instansi saya apabila perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dibeli					
7	Tidak menjadi suatu masalah bagi instansi saya, apabila suatu transaksi memiliki bukti pendukung ganda					
8	Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya ditemukan adanya pengeluaran tanpa dokumen pendukung					
9	Bukan suatu masalah bagi instansi saya bekerja, apabila sisa anggaran diberikan kepada pegawai sebagai bonus					

**Lampiran 2 SKOR NILAI**

**a. Skor nilai variabel moralitas**

Res	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	$\Sigma$
1	4	3	2	3	2	2	16
2	4	4	4	5	3	2	22
3	3	4	2	2	1	1	13
4	5	4	5	5	2	4	25
5	4	4	4	4	2	1	19
6	5	4	5	5	2	3	24
7	1	1	1	2	1	3	9
8	2	2	2	2	3	1	12
9	5	4	3	3	3	4	22
10	2	2	2	2	1	2	11
11	5	4	5	5	3	5	27
12	5	4	5	5	4	5	28
13	4	4	5	2	2	2	19
14	2	2	2	2	3	3	14
15	5	4	5	5	2	3	24
16	4	4	4	5	1	2	20
17	5	5	5	5	2	1	23
18	4	5	4	4	2	3	22
19	5	4	4	4	4	4	25
20	5	4	4	4	2	1	20
21	4	4	4	4	2	1	19
22	4	4	4	4	3	1	20
23	4	4	4	4	1	3	20
24	4	4	4	3	2	2	19
25	5	4	4	5	3	1	22
26	4	4	4	4	2	2	20
27	4	4	4	4	1	3	20
28	4	4	3	4	3	3	21
29	5	5	4	5	2	1	22
30	4	3	4	3	2	3	19
31	2	2	2	2	1	1	10
32	1	1	1	1	2	3	9
33	1	2	1	1	2	2	9
34	2	2	2	2	2	2	12
35	2	2	2	2	1	2	11
36	5	4	4	4	1	1	19
37	2	2	2	2	2	2	12

38	1	4	1	2	1	1	10
39	5	5	5	4	1	1	21
40	2	2	2	2	2	3	13
41	2	2	2	2	3	2	13
42	1	2	1	2	2	2	10
43	1	1	1	1	2	3	9
44	1	1	2	2	2	2	10
45	2	2	2	2	2	2	12
46	1	2	4	4	1	1	13
47	1	2	4	4	1	5	17
48	1	3	5	4	2	2	17
49	3	2	5	1	5	5	21
50	5	5	5	4	5	4	28
51	4	5	4	4	5	5	27
52	1	3	5	4	1	1	15
53	1	3	5	4	1	3	17
54	1	2	4	4	1	1	13
55	3	3	3	3	3	3	18
56	3	4	3	3	5	5	23
57	5	4	5	5	4	2	25
58	3	3	3	3	2	2	16
59	1	1	1	2	1	1	7
60	5	2	5	5	3	3	23
61	1	1	2	2	4	1	11
62	2	1	1	2	1	5	12
63	5	2	5	5	2	1	20
64	4	4	4	4	1	1	18
65	4	1	2	2	3	5	17







c. Skor nilai variabel motivasi

Res	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	$\Sigma$
1	4	3	4	3	2	16
2	4	5	5	4	2	20
3	4	5	5	2	3	19
4	4	5	5	4	4	22
5	4	4	4	3	3	18
6	4	5	5	4	4	22
7	4	4	4	2	1	15
8	4	4	4	2	2	16
9	4	5	5	4	3	21
10	4	4	4	2	2	16
11	4	5	5	4	4	22
12	4	5	5	4	4	22
13	4	5	5	4	4	22
14	4	4	4	2	2	16
15	4	5	5	4	4	22
16	5	5	5	5	5	25
17	5	5	3	4	5	22
18	4	4	4	4	5	21
19	4	5	5	5	5	24
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	5	5	5	25
22	5	5	5	5	4	24
23	4	4	4	4	4	20
24	5	4	4	4	4	21
25	5	5	5	5	5	25
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	4	3	3	20
28	4	4	4	5	5	22
29	4	5	5	5	5	24
30	3	4	4	3	2	16
31	4	5	4	2	4	19
32	5	5	5	4	4	23
33	4	5	5	5	4	23
34	4	4	4	4	3	19
35	4	4	4	4	3	19
36	5	4	5	4	4	22
37	4	4	5	4	2	19
38	4	5	4	2	4	19

39	4	4	4	2	2	16
40	4	4	4	2	4	18
41	4	4	5	3	5	21
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	3	4	19
44	4	5	5	4	4	22
45	4	4	4	4	5	21
46	5	4	4	4	3	20
47	5	4	5	4	3	21
48	5	4	5	4	3	21
49	2	2	3	4	4	15
50	4	5	4	3	3	19
51	3	3	4	3	3	16
52	5	4	5	4	3	21
53	5	4	5	4	3	21
54	4	5	4	5	3	21
55	3	3	3	3	3	15
56	3	2	3	3	4	15
57	4	3	4	4	3	18
58	4	3	4	4	3	18
59	5	5	5	2	4	21
60	5	5	5	2	4	21
61	5	5	5	4	4	23
62	5	5	5	4	4	23
63	5	5	5	2	3	20
64	5	4	4	4	3	20
65	4	4	5	1	2	16

d. Skor nilai variabel penegakan hukum

Res	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	$\Sigma$
1	5	4	4	4	5	22
2	5	5	5	5	5	25
3	4	4	4	4	5	21
4	5	4	5	5	5	24
5	3	3	3	4	4	17
6	5	4	5	5	5	24
7	4	4	4	4	4	20
8	4	4	4	4	4	20
9	5	4	3	2	4	18
10	4	4	4	4	4	20
11	5	4	5	5	5	24
12	5	4	5	5	5	24
13	5	4	5	5	5	24
14	4	4	4	4	4	20
15	5	4	5	5	5	24
16	3	4	4	5	5	21
17	5	5	5	5	5	25
18	4	5	4	5	4	22
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	5	5	5	25
22	3	4	4	5	5	21
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	4	5	4	4	4	21
26	4	4	4	4	4	20
27	4	5	4	4	4	21
28	3	4	3	5	5	20
29	5	5	5	5	5	25
30	4	4	3	4	4	19
31	4	5	5	5	5	24
32	5	5	5	5	4	24
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	5	4	4	4	5	22
37	5	4	5	4	5	23
38	4	4	4	4	4	20

39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	4	4	20
41	5	5	5	5	5	25
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	5	4	5	4	5	23
46	5	4	5	4	5	23
47	5	4	5	4	5	23
48	5	4	5	4	5	23
49	5	4	4	5	5	23
50	5	4	5	4	5	23
51	4	3	4	3	3	17
52	5	4	5	4	5	23
53	5	4	5	4	5	23
54	5	4	5	4	5	23
55	3	3	3	3	3	15
56	3	3	3	3	4	16
57	3	3	3	3	4	16
58	3	3	3	3	4	16
59	5	4	4	5	5	23
60	5	4	4	5	5	23
61	5	4	4	5	5	23
62	5	4	4	5	5	23
63	5	4	4	5	5	23
64	4	3	4	5	5	21
65	4	4	5	4	4	21

e. Skor nilai variabel *fraud*

Res	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	$\Sigma$
1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	15
2	2	2	2	2	1	3	2	2	2	18
3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	15
4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	19
5	1	2	2	1	4	1	2	2	2	17
6	2	1	2	2	2	2	2	2	4	19
7	2	4	2	1	2	4	2	3	2	22
8	1	1	1	1	2	1	2	1	1	11
9	2	2	1	1	2	4	2	2	2	18
10	1	2	2	2	2	2	3	2	3	19
11	1	2	2	2	2	2	3	2	3	19
12	4	3	3	2	2	2	3	2	3	24
13	4	3	3	2	2	2	3	2	3	24
14	4	3	3	2	2	2	3	2	3	24
15	4	3	3	2	2	2	3	2	3	24
16	2	2	1	2	1	2	1	1	2	14
17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
18	2	2	2	3	3	2	2	3	2	21
19	2	1	2	2	2	2	2	1	2	16
20	4	4	3	3	2	2	2	2	1	23
21	4	4	2	2	5	5	2	2	2	28
22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
23	4	4	4	3	2	2	2	2	2	25
24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
25	2	2	2	2	1	2	1	1	1	14
26	2	2	2	2	1	2	2	2	1	16
27	2	1	1	2	2	2	3	2	2	17
28	4	2	2	2	3	2	3	3	2	23
29	2	2	1	1	2	2	2	2	1	15
30	4	4	3	4	3	4	3	2	2	29
31	1	1	1	2	1	2	1	1	1	11
32	1	1	1	2	2	2	1	1	1	12
33	2	2	2	2	1	1	1	1	1	13
34	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17
35	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17
36	1	1	2	1	1	1	2	1	2	12
37	2	1	2	2	1	2	2	1	2	15
38	1	1	2	2	2	2	1	2	2	15

39	1	2	1	1	1	1	1	1	1	10
40	1	2	1	1	1	1	1	1	1	10
41	1	1	1	2	1	2	1	1	1	11
42	1	2	1	2	1	2	2	2	2	15
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
44	1	1	1	1	1	2	2	2	2	13
45	1	1	2	2	1	2	1	1	2	13
46	2	4	2	4	2	3	2	2	4	25
47	1	1	2	2	1	2	1	1	2	13
48	1	1	2	1	1	2	1	2	1	12
49	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
50	1	1	2	1	1	2	1	2	1	12
51	2	3	2	2	1	2	3	2	1	18
52	1	1	2	1	1	2	1	2	1	12
53	1	1	2	1	1	2	1	2	1	12
54	1	1	2	2	1	2	1	1	2	13
55	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
56	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
57	3	3	3	3	4	4	3	3	3	29
58	3	3	3	3	4	4	3	3	3	29
59	4	1	2	1	1	2	5	1	3	20
60	5	2	4	4	4	2	3	2	2	28
61	4	3	4	2	2	2	5	2	2	26
62	1	1	1	1	2	2	2	2	1	13
63	1	1	2	2	1	1	2	1	1	12
64	2	2	2	1	1	1	2	2	1	14
65	2	2	1	2	2	1	2	2	2	16

**Lampiran 3 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF**

**1. VARIABEL MORALITAS APARATUR**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
X1.1	65	1	5	3,15	1,554
X1.2	65	1	5	3,06	1,248
X1.3	65	1	5	3,34	1,395
X1.4	65	1	5	3,29	1,271
X1.5	65	1	5	2,20	1,121
X1.6	65	1	5	2,42	1,322
X1	65	7	28	17,46	5,545
Valid N (listwise)	65				

**2. VARIABEL PENGENDALIAN INTERNAL**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
X2.1	65	3	5	4,32	,562
X2.2	65	3	5	3,83	,601
X2.3	65	2	5	4,05	,672
X2.4	65	2	5	3,89	,534
X2.5	65	3	5	4,09	,655
X2.6	65	3	5	4,11	,664
X2.7	65	3	5	3,98	,625
X2.8	65	2	5	4,05	,779
X2	65	24	40	32,32	3,113
Valid N (listwise)	65				



### 3. VARIABEL MOTIVASI

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	65	2	5	4,22	,625
X3.2	65	2	5	4,31	,748
X3.3	65	3	5	4,42	,610
X3.4	65	1	5	3,57	1,000
X3.5	65	1	5	3,54	,969
X3	65	15	25	20,05	2,689
Valid N (listwise)	65				

### 4. VARIABEL PENEGAKAN HUKUM

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X4.1	65	3	5	4,34	,691
X4.2	65	3	5	4,05	,513
X4.3	65	3	5	4,23	,656
X4.4	65	2	5	4,26	,668
X4.5	65	3	5	4,49	,562
X4	65	15	25	21,37	2,440
Valid N (listwise)	65				

**5. VARIABEL FRAUD**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Y1	65	1	5	2,02	1,125
Y2	65	1	4	1,97	,935
Y3	65	1	4	1,97	,749
Y4	65	1	4	1,91	,723
Y5	65	1	5	1,82	,900
Y6	65	1	5	2,08	,797
Y7	65	1	5	2,03	,865
Y8	65	1	3	1,78	,573
Y9	65	1	4	1,88	,761
Y	65	9	29	17,45	5,315
Valid N (listwise)	65				

**Lampiran 4 STATISTIK DESKRIPTIF KATEGORI PENILAIAN RESPONDEN**

**a. Variabel Moralitas**

No	Kategori	$\Sigma$ responden	Persentase
1	Sangat Tidak Bermoral	4	6%
2	Tidak Bermoral	16	25%
3	Cukup Bermoral	21	32%
4	Bermoral	15	23%
5	Sangat Bermoral	9	14%

Sumber: Data yang diolah 2017

**b. Variabel Opportunity**

No	Kategori	$\Sigma$ responden	Persentase
1	Sangat Tidak Efektif	0	0%
2	Tidak Efektif	0	0%
3	Cukup Efektif	3	5%
4	Efektif	33	51%
5	Sangat Efektif	29	45%

Sumber: Data yang diolah 2017

**c. Variabel Need**

No	Kategori	$\Sigma$ responden	Persentase
1	Sangat Tidak Termotivasi	0	0%
2	Tidak Termotivasi	0	0%
3	Cukup Termotivasi	4	6%
4	Termotivasi	28	43%
5	Sangat Termotivasi	33	51%

Sumber: Data yang diolah, 2017

**d. Variabel Exposure**

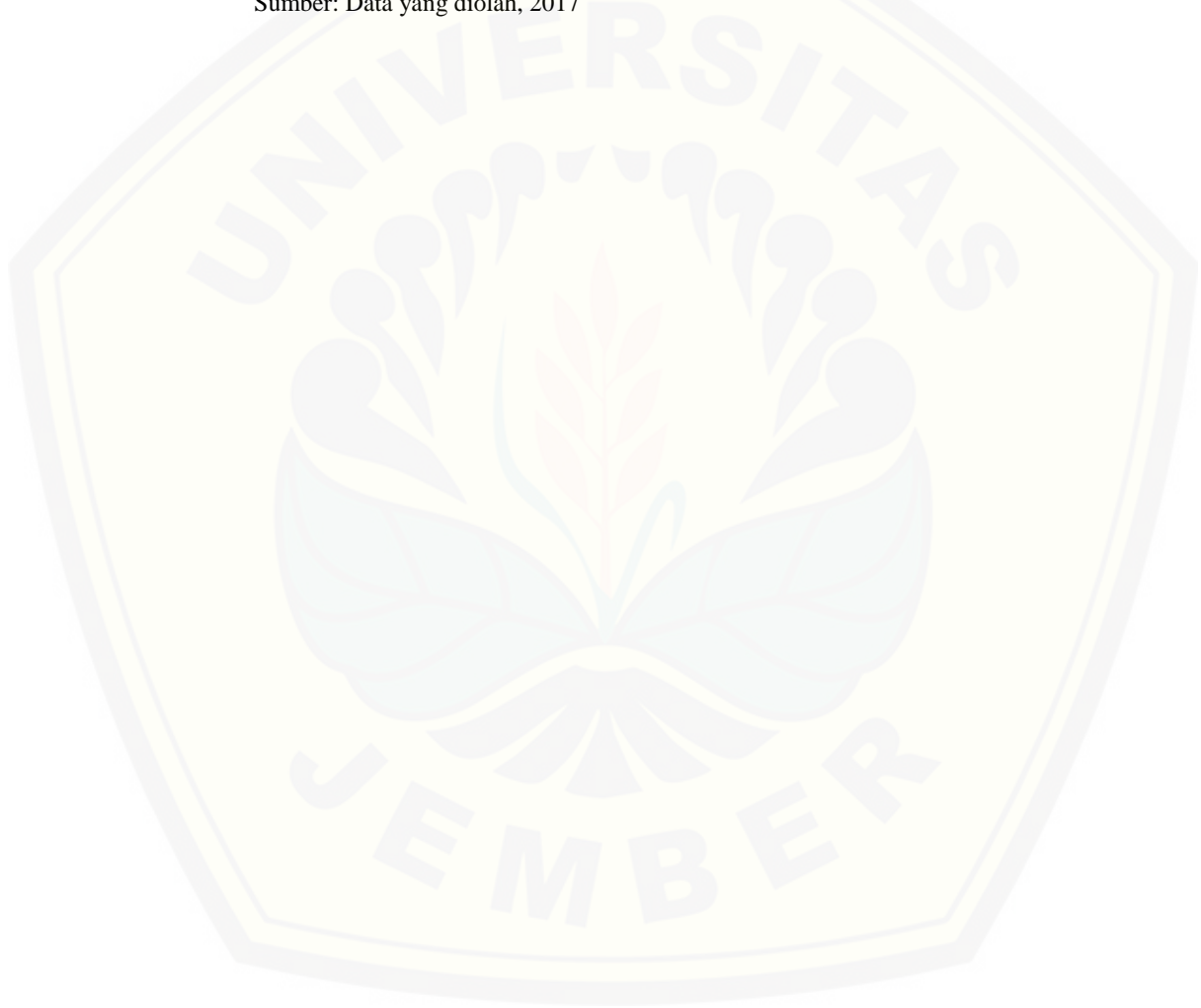
No	Kategori	$\Sigma$ responden	Persentase
1	Sangat Tidak Tegak	0	0%
2	Tidak Tegak	0	0%
3	Cukup Tegak	1	2%
4	Tegak	26	40%
5	Sangat Tegak	38	58%

Sumber: Data yang diolah, 2017

e. Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintah Desa

No	Kategori	$\Sigma$ responden	Persentase
1	Sangat Jarang Terjadi	19	29%
2	jarang Terjadi	31	48%
3	Cukup Terjadi	15	23%
4	Jarang Terjadi	0	0%
5	Sangat Sering Terjadi	0	0%

Sumber: Data yang diolah, 2017



**Lampiran 5 UJI KUALITAS DATA**

**1. UJI VALIDITAS**

**a. Moralitas**

		<b>Correlations</b>						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,736**	,646*	,681*	,323*	,136	,862**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,009	,281	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65
X1.2	Pearson Correlation	,736*	1	,652*	,678*	,181	-,025	,781**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,149	,842	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65
X1.3	Pearson Correlation	,646*	,652**	1	,816*	,196	,084	,826**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,118	,508	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65
X1.4	Pearson Correlation	,681*	,678**	,816*	1	,068	-,018	,787**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,591	,889	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65
X1.5	Pearson Correlation	,323*	,181	,196	,068	1	,470*	,510**
	Sig. (2-tailed)	,009	,149	,118	,591		,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65
X1.6	Pearson Correlation	,136	-,025	,084	-,018	,470*	1	,383**
	Sig. (2-tailed)	,281	,842	,508	,889	,000		,002
	N	65	65	65	65	65	65	65
X1	Pearson Correlation	,862*	,781**	,826*	,787*	,510*	,383*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,002	
	N	65	65	65	65	65	65	65

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**b. Pengendalian Internal**

		Correlations								
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,211	,291*	,274*	,342*	,491*	,326*	,251*	,636*
	Sig. (2-tailed)		,092	,019	,027	,005	,000	,008	,044	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X2.2	Pearson Correlation	,211	1	,136	,283*	,516*	,164	-,049	-,083	,422*
	Sig. (2-tailed)	,092		,281	,022	,000	,193	,700	,510	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X2.3	Pearson Correlation	,291*	,136	1	,668*	,168	,199	,188	,503*	,650*
	Sig. (2-tailed)	,019	,281		,000	,181	,112	,134	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X2.4	Pearson Correlation	,274*	,283*	,668*	1	,342*	,165	-,005	,538*	,660*
	Sig. (2-tailed)	,027	,022	,000		,005	,188	,968	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X2.5	Pearson Correlation	,342*	,516*	,168	,342*	1	,551*	,233	,114	,660*
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,181	,005		,000	,062	,366	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X2.6	Pearson Correlation	,491*	,164	,199	,165	,551*	1	,644*	,262*	,716*
	Sig. (2-tailed)	,000	,193	,112	,188	,000		,000	,035	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X2.7	Pearson Correlation	,326*	-,049	,188	-,005	,233	,644*	1	,226	,533*
	Sig. (2-tailed)	,008	,700	,134	,968	,062	,000		,070	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X2.8	Pearson Correlation	,251*	-,083	,503*	,538*	,114	,262*	,226	1	,606*
	Sig. (2-tailed)	,044	,510	,000	,000	,366	,035	,070		,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X2	Pearson Correlation	,636*	,422*	,650*	,660*	,660*	,716*	,533*	,606*	1

Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65	65

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### c. Motivasi

		Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,524*	,500**	,176	,167	,617**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,161	,185	,000
	N	65	65	65	65	65	65
X3.2	Pearson Correlation	,524*	1	,640**	,159	,285*	,707**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,206	,021	,000
	N	65	65	65	65	65	65
X3.3	Pearson Correlation	,500*	,640*	1	,221	,144	,655**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,076	,251	,000
	N	65	65	65	65	65	65
X3.4	Pearson Correlation	,176	,159	,221	1	,517**	,693**
	Sig. (2-tailed)	,161	,206	,076		,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65
X3.5	Pearson Correlation	,167	,285*	,144	,517**	1	,703**
	Sig. (2-tailed)	,185	,021	,251	,000		,000
	N	65	65	65	65	65	65
X3	Pearson Correlation	,617*	,707*	,655**	,693**	,703**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	65	65	65	65	65	65

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).





Y2	Pearson Correlation	,639*	1	,534*	,504**	,495*	,507*	,387*	,513*	,324**	,779*
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,001	,000	,008	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y3	Pearson Correlation	,723*	,534*	1	,543**	,386*	,240	,507*	,348*	,405**	,741*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,002	,055	,000	,004	,001	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y4	Pearson Correlation	,501*	,504*	,543*	1	,454*	,365*	,254*	,253*	,405**	,666*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,003	,041	,042	,001	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y5	Pearson Correlation	,497*	,495*	,386*	,454**	1	,522*	,389*	,589*	,377**	,736*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,000		,000	,001	,000	,002	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y6	Pearson Correlation	,365*	,507*	,240	,365**	,522*	1	,223	,482*	,351**	,626*
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,055	,003	,000		,074	,000	,004	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y7	Pearson Correlation	,658*	,387*	,507*	,254*	,389*	,223	1	,392*	,528**	,693*
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,041	,001	,074		,001	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y8	Pearson Correlation	,345*	,513*	,348*	,253*	,589*	,482*	,392*	1	,333**	,638*
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,004	,042	,000	,000	,001		,007	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y9	Pearson Correlation	,404*	,324*	,405*	,405**	,377*	,351*	,528*	,333*	1	,636*
	Sig. (2-tailed)	,001	,008	,001	,001	,002	,004	,000	,007		,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y	Pearson Correlation	,835*	,779*	,741*	,666**	,736*	,626*	,693*	,638*	,636**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2. UJI RELIABILITAS

### a. Moralitas

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	65	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	65	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,841	5

### b. Pengendalian Internal

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	65	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	65	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,765	7

### c. Motivasi

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	65	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	65	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,686	5

**d. Penegakan Hukum**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	65	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	65	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,844	5

**e. Fraud**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	65	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	65	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,873	9

**Lampiran 6 UJI NORMALITAS DATA**

a. *Kolmogorov Smirnov*

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,80468668
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,099
	Positive	,099
	Negative	-,065
Test Statistic		,099
Asymp. Sig. (2-tailed)		,192 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

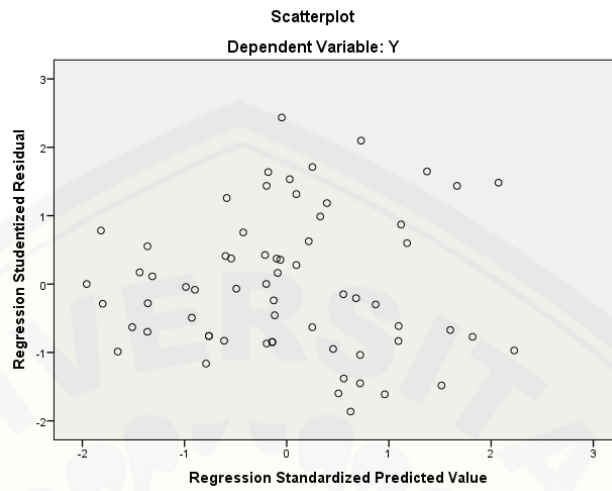
c. Lilliefors Significance Correction.

b. Uji Multikolinearitas

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	26,645	6,556		4,064	,000		
	X1	,340	,123	,331	2,765	,008	,949	1,054
	X2	-,696	,305	-,381	-2,281	,026	,487	2,052
	X3	,090	,281	,046	,321	,749	,674	1,484
	X4	,174	,374	,080	,465	,643	,462	2,166

a. Dependent Variable: Y

c. Uji Heterokedastisitas



**Lampiran 7 ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA**

a. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	330,621	4	82,655	3,357	,015 <sup>b</sup>
	Residual	1477,441	60	24,624		
	Total	1808,062	64			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26,645	6,556		4,064	,000
	X1	,340	,123	,331	2,765	,008
	X2	-,696	,305	-,381	-2,281	,026
	X3	,090	,281	,046	,321	,749
	X4	,174	,374	,080	,465	,643

a. Dependent Variable: Y

c. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,428 <sup>a</sup>	,183	,128	4,962

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y